



PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk merespon isu gender melalui pelebagaan PUG dan penyelenggaraan PUG.
7. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil atau manfaat pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan

sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan.

10. Komitmen adalah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab.
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LKPJ, adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat LPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
13. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LkjiP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya, partisipasi dalam pembangunan, dan manfaat yang dinikmati dengan melihat pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
15. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi

- perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai Kesetaraan Gender.
 17. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
 18. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan gender yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pembangunan.
 19. *Gender Action Budget* yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen Kerangka Acuan Kerja yang telah dilakukan analisa gender dan ditandatangani sebagai dokumen pernyataan gender.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
 23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen rencana aksi yang memuat strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai tindak lanjut dari kebijakan, strategi, dan program yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya dengan mengintegrasikan PUG di dalamnya.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
30. Sistem Data Gender adalah sistem data yang dibangun oleh pemerintah yang terdiri dari data pilah berdasarkan pemilahan jenis kelamin perempuan dan laki-laki serta data pelebagaan penyelenggaraan data gender yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang

Responsif Gender.

31. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah strategi mengarusutamakan gender pada kebijakan, Sumber Daya Manusia dan internalisasi gender serta sistem data gender.
32. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PUG adalah strategi mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan pembangunan di daerah.
33. Kebijakan Responsif Gender adalah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
34. Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sehingga lebih rentan terdampak suatu kondisi sosial ekonomi, kebijakan maupun bencana. Kelompok rentan ini dapat meliputi disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak, korban kekerasan, perempuan dan anak miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan pekerja migran, perempuan hamil dan menyusui serta perempuan anak dalam situasi khusus.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif Gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini:

- a. memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang Responsif Gender yang meliputi aspek perencanaan,

- penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pembangunan;
- b. menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui kebijakan Responsif Gender, penguatan sumber daya manusia, dan internalisasi kelembagaan PUG;
 - c. menyusun Sistem Data Gender untuk pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan kesenjangan Gender untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki termasuk Kelompok Rentan memperoleh akses, memiliki kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam pembangunan di DIY; dan
 - d. memperkuat kolaborasi Penyelenggaraan PUG dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

BAB II

SISTEM DATA GENDER

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Data Gender yang terdiri atas:
 - a. data pilah Gender; dan
 - b. data kualitatif Gender.
- (2) Data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data yang berbentuk angka/statistik dan dipilah menurut jenis kelamin untuk melihat kesenjangan Gender antara laki laki dan perempuan.
- (3) Data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi variabel untuk kelompok rentan paling sedikit berupa usia, wilayah, dan status sosial.
- (4) Pengumpulan data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai produsen data yang dikelola melalui teknologi informasi dan dapat diakses publik.
- (5) Data pilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan satu

data terintegrasi milik Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik.

- (6) Data kualitatif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data non-numerik yang menggambarkan pengalaman, persepsi, peran, hambatan, dan kebutuhan laki-laki serta perempuan yang dapat berupa data kebijakan, dokumen perencanaan, hasil kajian, hasil diskusi, data observasi sosial, data narasi, dan data persepsi.
- (7) Data kualitatif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (8) Sinkronisasi Sistem Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum data Gender dan forum data lain yang relevan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PPRG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PUG dalam PPRG meliputi proses:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi;
 - f. pengawasan; dan
 - g. pelaporan.

- (2) Dalam Penyelenggaraan PUG dalam PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan analisis gender untuk memperoleh data yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi tentang kesenjangan pada peran, kebutuhan, akses, kontrol, peluang partisipasi serta penerimaan manfaat terhadap laki-laki dan perempuan serta Kelompok Rentan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi Analisis Gender pada dokumen perencanaan:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat analisis GAP atau metode Analisis Gender lain yang sesuai.
- (5) Komponen Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. data pilah Gender; dan
 - b. analisa kesenjangan Gender.
- (6) Analisis Gender pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi unsur

penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik.

- (7) Analisis Gender pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi Analisis Gender pada:
 - a. dokumen penganggaran Pemerintah Daerah; dan
 - b. dokumen penganggaran Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen penganggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KUA PPAS;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. DPA.
- (3) Dokumen KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan Analisis Gender menggunakan GAP atau metode Analisis Gender lain yang sesuai.
- (4) Dokumen penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. DPA; dan
 - b. kerangka acuan kerja sub kegiatan.
- (5) Analisis Gender dilakukan pada penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Kerangka acuan kerja sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah sebagai pernyataan anggaran Gender dan menjadi GAB.
- (7) GAB yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penentuan Anggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan upaya pelaksanaan strategi untuk menjamin perspektif Gender.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. implementasi Analisis Gender pada pelaksanaan sub kegiatan;
 - b. penyediaan sarana prasarana responsif Gender;
 - c. penyelenggaraan mekanisme partisipasi inklusif;
 - d. pelayanan publik yang responsif Gender;
 - e. pendampingan pelaksanaan PUG; dan
 - f. penguatan kapasitas sumber daya manusia PUG.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan proses yang berfungsi untuk memantau jalannya pelaksanaan strategi PUG pada kebijakan, program dan rencana aksi serta pelayanan publik pembangunan agar tetap Responsif Gender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dan informasi Gender;
 - b. pemantauan keterlibatan dan manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki;

- c. identifikasi hambatan;
 - d. pencatatan capaian sementara; dan
 - e. pemberian rekomendasi perbaikan secara cepat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan:
- a. pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penyusunan dokumen hasil pemantauan.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan proses penilaian menyeluruh untuk melihat untuk mengukur efektivitas strategi yang sudah dilaksanakan dalam mengurangi kesenjangan Gender dan kebermanfaatan secara adil.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. pengukuran efektivitas program/kebijakan;
 - b. analisis faktor keberhasilan dan kegagalan;
 - c. penilaian hasil dan dampak;
 - d. identifikasi praktik baik; dan
 - e. pemberian rekomendasi perbaikan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan:
- a. evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penyusunan dokumen hasil evaluasi.
- (4) Dokumen hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan sebagai laporan Kelompok Kerja PUG kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan upaya memastikan bahwa PUG telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara efektif, bermanfaat dan mengurangi kesenjangan Gender.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. GAB;
 - b. Anggaran Responsif Gender;
 - c. *focal point* Gender; dan
 - d. sarana prasarana responsif Gender.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi unsur pengawasan urusan pemerintahan melaksanakan:
 - a. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penyusunan dokumen hasil pengawasan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi dokumen pelaporan:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen pelaporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. LKPJ;
 - b. LPPD; dan
 - c. dokumen pelaporan lain.

- (3) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam menyusun Laporan Kinerja Gubernur menyusun dokumen pelaporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan Kelompok Kerja PUG.
- (4) Dokumen pelaporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. LkjIP; dan
 - b. dokumen pelaporan lain.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi mengoordinasikan penyusunan dokumen pelaporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan *focal point* Gender.

BAB IV
RAD PUG
Pasal 13

- (1) RAD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan PUG secara terencana, terkoordinasi, dan terukur.
- (2) Periodisasi RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti periode RPJMD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPD dan RPJMD;
 - c. rencana aksi pembangunan Kesetaraan Gender;
 - d. mekanisme pelaksanaan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Komponen RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. prioritas peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;
 - b. prioritas penguatan kapasitas dan kemandirian serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;
 - c. prioritas peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - d. prioritas pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;
 - e. penguatan Penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan; dan
 - f. prioritas lain yang disusun berdasarkan kondisi yang harus direspon dalam pembangunan.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

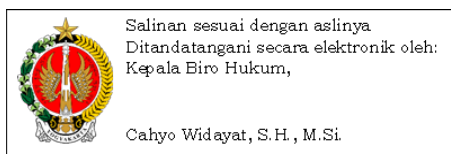
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berperspektif gender merupakan agenda penting dalam memastikan terpenuhinya hak seluruh warga negara atas hasil pembangunan, tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 27 ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28C ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk mendapatkan pendidikan dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pasal 28I ayat (2) juga mempertegas bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan tersebut.

Landasan konstitusional ini diperkuat melalui perangkat hukum lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Seluruh regulasi ini menegaskan bahwa keadilan dan kesetaraan gender bukan hanya kebutuhan moral, tetapi juga mandat kebijakan yang wajib diimplementasikan di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk di daerah.

Lebih jauh lagi, kesetaraan gender merupakan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), tepatnya pada tujuan kelima. Ketimpangan gender telah terbukti menjadi akar dari berbagai persoalan pembangunan, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, hingga stunting. Maka dari itu, pencapaian kesetaraan gender bukan sekadar alat, namun tujuan pembangunan itu sendiri. Tanpa kesetaraan gender, pembangunan tidak akan pernah inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks lokal, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menegaskan komitmennya melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pengarusutamaan gender. Pelembagaan PUG di DIY dilakukan secara menyeluruh, mencakup tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan. Inovasi juga terus diupayakan agar seluruh masyarakat—baik laki-laki maupun perempuan—memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari program pembangunan yang dijalankan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022–2027, kesetaraan gender menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi Gubernur DIY untuk meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat. Salah satu indikator utamanya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), sebagai bagian integral dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, di lapangan, tantangan masih begitu nyata. Perempuan masih kerap dihadapkan pada aturan sosial dan nilai budaya yang lebih mengutamakan laki-laki. Banyak perempuan yang sebenarnya memiliki kapasitas, keahlian, dan semangat untuk berkontribusi lebih besar, namun terhambat oleh struktur sosial yang patriarkis dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, negara melalui kebijakan PUG wajib hadir untuk mengoreksi ketimpangan ini dan mendorong sistem yang lebih adil dan setara.

Dalam kerangka revitalisasi implementasi PUG di DIY, telah muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan penyesuaian regulasi, termasuk perubahan kebijakan terkait pelembagaan, penyelenggaraan, serta inovasi-inovasi dalam implementasi PUG. Hal ini mencakup perlunya regulasi yang lebih spesifik dan teknis, seperti perubahan atas Peraturan Gubernur DIY mengenai pedoman PUG, yang akan memuat ketentuan baru mengenai *Gender Responsive Planning and Budgeting* (GRPB), Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, serta sistem data terpilah berdasarkan gender yang mutakhir dan dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan.

Urgensi pengarusutamaan gender bukan hanya karena mandat konstitusi atau komitmen internasional semata. Lebih dari itu, PUG adalah instrumen kunci untuk memastikan bahwa pembangunan tidak meninggalkan siapa pun. Pembangunan yang hanya dinikmati oleh separuh populasi tidak bisa disebut adil, apalagi berkelanjutan. Dalam konteks DIY yang kaya akan kearifan lokal dan nilai budaya, pengarusutamaan gender harus dijalankan dengan pendekatan yang kontekstual—tidak hanya top-down, namun juga memberdayakan dari akar rumput.

Perubahan regulasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah DIY tidak boleh berhenti di tataran normatif atau administratif. Ia harus diterjemahkan ke dalam kerja konkret di tiap OPD, menyasar isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan perempuan, perlindungan perempuan dari kekerasan, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, hingga akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dengan demikian, Perumusan Peraturan Gubernur DIY tentang pelaksanaan Perda 4 Tahun 2023 tentang PUG yang juga akan adalah langkah strategis yang perlu segera direalisasikan. Bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi sebagai wujud nyata komitmen DIY menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Daerah Istimewa Yogyakarta juga perlu menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender DIY ini diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di DIY adalah sebagai berikut:

1. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring- evaluasi (monev) pembangunan yang responsif gender.
2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memiliki akses, mendapatkan ruang partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
3. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di DIY dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.3 Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6).
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 tahun 2023 tentang Satu data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup dan Definisi

Rencana Aksi adalah dokumen rencana tindak dalam bentuk program/kegiatan secara sistematis untuk mencapai target indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen PK. Rencana aksi meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, program/kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama, target kinerja sebagai output/outcome pelaksanaan program/kegiatan, penanggung jawab program/kegiatan, pelaksana program/kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan penjelasan pengendalian pencapaian target kinerja secara berkala. Rencana aksi adalah dokumen tindak lanjut rencana pelaksanaan kegiatan yang memuat sasaran, indikator, program/kegiatan, rincian output dan anggaran, serta jadwal untuk satu tahun ke ke depan yang dibagi per triwulan. Rencana aksi digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya kegiatan¹

1.5 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan bagi penerima amanah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah diperjanjikan;
2. Mewujudkan pelaksanaan program kegiatan yang lebih terarah dalam rangka pencapaian target yang telah diperjanjikan
3. Sebagai dasar penentuan pelaksanaan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran; tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar pengukuran pencapaian target secara periodik².

¹ Biro Perencanaan Kemendikbud. 2024. Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, halaman 4.

² Biro Perencanaan Kemendikbud. 2024. Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, halaman 6.

BAB II

PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DALAM RPJPD 2025-2045 DAN RPJMD 2023-2027

2.1 Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPD 2025-2045

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa kesetaraan gender sebagai salah satu pilar fundamental. Di tingkat global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) telah menempatkan kesetaraan gender sebagai tujuan ke-5 yang harus dicapai oleh semua negara anggota PBB. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan. Di tingkat daerah, implementasi kesetaraan gender menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki karakteristik unik baik dari sisi sosial, budaya, maupun politik keistimewaannya. Provinsi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan ruang bagi perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial-budaya. Dinamika keistimewaan ini memberikan tantangan dan peluang tersendiri dalam implementasi pembangunan kesetaraan gender.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DIY 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menentukan arah pembangunan daerah untuk dua dekade mendatang. Integrasi isu gender dalam dokumen ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembangunan di DIY dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua warganya tanpa diskriminasi berdasarkan gender. RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang memiliki peran penting dalam memberikan fondasi kebijakan yang akan diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara berskala lima tahunan dan tahunan.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, meskipun telah ada berbagai kebijakan nasional dan daerah terkait kesetaraan gender, implementasinya seringkali mengalami hambatan baik dari sisi struktural maupun kultural. Kedua, DIY dengan keistimewaan budayanya yang kuat memiliki dinamika gender yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual. Ketiga, evaluasi terhadap integrasi gender dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah masih terbatas, khususnya di DIY.

2.2 RPJPD DIY dan Integrasi Gender

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Dokumen ini berisi visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang akan datang. Analisis terhadap integrasi

gender dalam RPJPD ini penting untuk memahami sejauh mana kesetaraan gender telah menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang DIY.

RPJPD DIY 2025-2045 memiliki visi “Terwujudnya DIY yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”. Visi ini kemudian dijabarkan dalam delapan misi pembangunan daerah. Dalam analisis gender, penting untuk melihat bagaimana kesetaraan gender diintegrasikan dalam visi dan misi ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun istilah “kesetaraan gender” tidak secara eksplisit disebutkan dalam visi, terdapat beberapa misi yang memiliki potensi untuk mengakomodasi isu gender, khususnya misi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kehidupan sosial-budaya.

Dalam struktur dokumen RPJPD DIY 2025-2045, isu gender sebagian besar diintegrasikan dalam Bab V tentang Arah Kebijakan dan Ssaran Pokok, khususnya pada bagian pembangunan sumber daya manusia dan penguatan kehidupan sosial-budaya. Namun, integrasi ini masih bersifat sektoral dan belum holistik mencakup semua aspek pembangunan. Terdapat kecenderungan untuk memisahkan isu gender sebagai “isu perempuan” daripada memahaminya sebagai isu lintas sektor yang mempengaruhi seluruh aspek pembangunan.

Dokumen RPJPD DIY 2025-2045 juga mengidentifikasi beberapa tantangan pembangunan daerah yang relevan dengan isu gender, antara lain: (1) kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih terjadi di beberapa kelompok masyarakat, (2) tingkat pengangguran yang masih tinggi khususnya among perempuan muda, (3) prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta (4) partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Identifikasi tantangan ini menunjukkan adanya kesadaran tentang isu gender dalam perencanaan, namun perlu diikuti dengan strategi yang lebih komprehensif.

Salah satu kelemahan utama dalam integrasi gender dalam RPJPD DIY 2025-2045 adalah kurangnya analisis gender yang mendalam sebagai dasar perumusan kebijakan. Dokumen ini belum menyajikan data desegregasi gender yang memadai untuk mengidentifikasi ketimpangan gender di berbagai sektor pembangunan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat umum dan belum responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki.

2.3 Indikator, Target dan Program Berperspektif Gender

RPJPD DIY 2025-2045 menetapkan berbagai indikator kinerja pembangunan daerah yang akan dicapai hingga tahun 2045. Dalam analisis gender, penting untuk mengevaluasi sejauh mana indikator-indikator ini sensitif gender dan mampu mengukur kemajuan kesetaraan gender. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari total 43 indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJPD, hanya sekitar 15% yang secara eksplisit mengukur aspek gender, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan pada pendidikan tinggi, dan persentase perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Tabel 1. Indikator kinerja berperspektif gender dalam RPJPD DIY 2025-2045

No	Indikator	Target 2025	Target 2045	Satuan
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,5	98,5	-
2	Angka Partisipan Kasar (APK) perempuan pendidikan tinggi	45	70	%
3	Persentase perempuan dalam posisi kepemimpinan	30	50	%
4	Rasio jenis kelamin pada angka pengangguran terbuka	1,2	1,0	-
5	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan	80	100	%

Sumber: Analisis dari RPJPD DIY 2025-2045.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target yang ditetapkan untuk indikator gender secara umum menunjukkan tren peningkatan yang positif. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penetapan target ini. Pertama, target untuk beberapa indikator seperti persentase perempuan dalam posisi kepemimpinan (50% pada 2045) masih jauh dari prinsip keseimbangan gender (50:50). Kedua, tidak ada indikator yang mengukur aspek kualitatif partisipasi perempuan, seperti kualitas keputusan yang dibuat atau jenis posisi kepemimpinan yang dipegang perempuan.

Program-program berperspektif gender dalam RPJPD DIY 2025-2045 sebagian besar terkonsentrasi pada tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program pendidikan berperspektif gender mencakup peningkatan akses perempuan ke pendidikan tinggi dan vokasi, pengembangan kurikulum non-diskriminatif, serta pelatihan guru tentang pendidikan inklusif gender. Program kesehatan berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi menekankan pada peningkatan akses perempuan terhadap pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis perempuan.

2.4 Data Perkembangan IPG dan IDG di DIY

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GDI) merupakan dua indikator utama untuk mengukur kemajuan kesetaraan gender di suatu daerah. IPG mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sementara itu, GDI mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, perkembangan IPG DIY dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif namun dengan laju peningkatan yang relatif lambat. Pada tahun 2018, IPG DIY mencapai 89,7 dan meningkat menjadi 91,3 pada tahun 2023. Laju peningkatan rata-rata adalah sekitar 0,32 poin per tahun, yang berarti untuk mencapai target RPJPD 2025-2045 sebesar 98,5 pada tahun 2045, diperlukan percepatan yang signifikan.

Tabel 2. Berikut Menunjukkan Perkembangan IPG DIY Dari Tahun 2018 Hingga 2023

Tahun	IPG DIY	Peringkat Nasional	Kategori
2018	94,73	5	Tinggi
2019	94,77	5	Tinggi
2020	94,80	4	Tinggi
2021	94,88	4	Tinggi
2022	94,99	4	Tinggi
2023	94,93	4	Tinggi

Sumber: BPS DIY, 2023 (diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa DIY secara konsisten menempati peringkat 4-5 secara nasional dalam hal IPG, yang menunjukkan bahwa pencapaian kesetaraan gender di DIY relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Indonesia. Namun, kategori IPG DIY masih berada pada level “Tinggi” dengan rentang skor 80-100, yang berarti masih ada ruang untuk perbaikan untuk mencapai kategori “Sangat Tinggi” (skor >100).

Secara komponen, IPG DIY didukung oleh pencapaian yang baik dalam dimensi kesehatan dan pendidikan, namun masih tertinggal dalam dimensi ekonomi. Rasio jenis kelamin pada angka partisipan angkatan kerja (TPAK) di DIY 2010-2023 masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan TPAK perempuan sekitar 57-64% dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 78-83%. Ketimpangan ini semakin besar pada kelompok usia produktif (25-54 tahun), di mana TPAK perempuan hanya sekitar 65% dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 90%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY juga menunjukkan tren yang positif meskipun dengan laju peningkatan yang moderat. Pada tahun 2018, GDI DIY mencapai 69,64 dan meningkat menjadi 78,46 pada tahun 2023. Peningkatan GDI ini didorong oleh peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan penurunan angka kematian ibu. Namun, ketimpangan masih terlihat pada komponen pendapatan, di mana pendapatan perempuan rata-rata hanya sekitar 70-75% dari pendapatan laki-laki.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun DIY memiliki pencapaian yang relatif baik dalam kesetaraan gender dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, masih terdapat ketimpangan yang signifikan, khususnya dalam dimensi ekonomi. Ketimpangan ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi dalam RPJPD DIY 2025-2045 untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif.

2.5 Program Unggulan Berbasis Gender

Salah satu layanan unggulan berbasis gender di DIY adalah Layanan Satu Atap Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan yang diimplementasikan oleh Dinas P3AP2. Program ini merupakan respon terhadap tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di DIY. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, DIY termasuk dalam 10 provinsi dengan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia.

Layanan Satu Atap Terpadu ini menyediakan layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan, meliputi: (1) layanan medis dan psikososial, (2) bantuan hukum, (3) tempat perlindungan sementara, (4) pemberdayaan ekonomi, serta (5) pendampingan reintegrasi sosial. Program ini diimplementasikan melalui pusat pelayanan terpadu di tingkat provinsi dan lima kabupaten/kota di DIY.

Evaluasi terhadap program ini menunjukkan beberapa hasil positif. Pertama, terjadi peningkatan akses perempuan korban kekerasan terhadap layanan komprehensif. Pada tahun 2022, sekitar 85% korban kekerasan yang melapor mendapatkan layanan komprehensif, meningkat dari hanya 65% pada tahun 2019. Kedua, terjadi peningkatan tingkat kepercayaan korban untuk melapor kasus kekerasan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan dari sekitar 500 kasus pada tahun 2019 menjadi sekitar 750 kasus pada tahun 2023.

Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, terbatasnya kapasitas layanan, khususnya dalam hal tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Kedua, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan korban untuk melapor kasus kekerasan, sehingga diperkirakan hanya sekitar 30-40% kasus kekerasan yang benar-benar dilaporkan. Ketiga, masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait, seperti antara Dinas P3AP2 dengan kepolisian, pengadilan, dan dinas kesehatan.

Studi kasus lain adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Gender. Program ini diimplementasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerja sama dengan Dinas P3AP2. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses perempuan terhadap modal, pelatihan, dan pasar untuk pengembangan UMKM.

Program ini telah memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 perempuan pelaku UMKM di DIY hingga tahun 2023. Berdasarkan evaluasi program, terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perempuan pelaku UMKM sekitar 35-40% setelah mengikuti program ini. Selain itu, terjadi peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase perempuan yang memiliki penghasilan mandiri dari sekitar 40% menjadi sekitar 60%.

Namun, program ini juga menghadapi beberapa kendala. Pertama, terbatasnya akses perempuan terhadap pembiayaan formal, sehingga sebagian besar masih bergantung pada pinjaman informal dengan bunga yang tinggi. Kedua, masih rendahnya penguasaan teknologi dan digital marketing di kalangan perempuan pelaku UMKM, terutama yang berusia di atas 40 tahun. Ketiga, masih adanya hambatan kultural yang membatasi mobilitas perempuan untuk mengakses pasar yang lebih luas.

2.6 Pemetaan Kelembagaan

Implementasi kesetaraan gender dalam RPJPD DIY 2025-2045 memerlukan kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang efektif antar instansi terkait. Pemetaan kelembagaan gender di DIY mencakup Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2), serta Forum Gender Daerah yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) DIY memiliki peran sentral dalam integrasi gender dalam perencanaan pembangunan. Sebagai koordinator perencanaan daerah, Bapperida bertanggung jawab untuk memastikan bahwa analisis gender dilakukan dalam setiap tahap perencanaan, dari penyusunan RPJPD hingga RKPD. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 92 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Bapperida diwajibkan untuk menyusun panduan teknis integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah dan melakukan capacity building bagi aparatur perencanaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) DIY merupakan leading sector dalam implementasi kebijakan gender di tingkat eksekutif. Dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan implementasi program gender, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Dinas P3AP2 juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang gender. Namun, berdasarkan analisis terhadap Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kapasitas Dinas P3AP2 masih terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran.

Forum Gender Daerah DIY merupakan mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan gender. Forum ini terdiri dari perwakilan organisasi perempuan, akademisi, praktisi gender, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan hak perempuan. Forum Gender Daerah memiliki peran penting dalam melakukan advokasi kebijakan, monitoring implementasi program gender, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah. Namun, efektivitas forum ini masih terbatas karena kurangnya dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai.

Tantangan utama dalam kelembagaan gender di DIY adalah terbatasnya koordinasi antar instansi dan masih lemahnya kapasitas aparatur dalam analisis gender. Banyak perangkat daerah lain di luar Bapperida dan Dinas P3AP2 belum memahami pentingnya integrasi gender dalam kebijakan sektoral mereka. Akibatnya, implementasi kesetaraan gender masih bersifat parsial dan belum mencapai hasil yang signifikan.

Penguatan kelembagaan gender di DIY memerlukan beberapa strategi kunci, antara lain: (1) peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pelaksana kebijakan melalui pelatihan analisis gender, (2) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis gender yang terintegrasi, (3) penguatan peran Forum Gender Daerah melalui mekanisme partisipasi yang lebih formal, serta (4) peningkatan alokasi anggaran untuk kelembagaan gender, khususnya Dinas P3AP2.

2.7 Strategi Penguatan Kelembagaan Gender di Tingkat Provinsi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa strategi kunci untuk penguatan kelembagaan gender di tingkat provinsi DIY yang dapat mendukung implementasi RPJPD 2025-2045. Strategi-strategi ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang telah diidentifikasi, mulai dari keterbatasan kapasitas aparatur hingga koordinasi antar instansi yang lemah.

Pertama, penguatan peran dan kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) dalam integrasi gender dalam perencanaan. Bappeda perlu dilengkapi dengan unit khusus yang memiliki mandat jelas untuk melakukan analisis gender dalam setiap dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD hingga RKPD. Unit ini harus dipimpin oleh pejabat eselon III atau IV yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam isu gender. Selain itu, Bappeda perlu mengembangkan pedoman teknis dan modul pelatihan tentang integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah yang dapat digunakan oleh semua perangkat daerah di DIY.

Kedua, peningkatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas P3AP2) sebagai leading sector dalam implementasi kebijakan gender. Peningkatan kapasitas ini mencakup aspek kuantitatif (penambahan jumlah pegawai dengan keahlian gender) dan kualitatif (peningkatan kompetensi pegawai existing). Dinas P3AP2 juga perlu diperkuat dari sisi kewenangan dan sumber daya, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan kewenangan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral yang efektif.

Ketiga, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis gender yang terintegrasi dan komprehensif. Sistem ini harus mampu mengukur tidak hanya output program gender tetapi juga outcome dan impact-nya terhadap perbaikan status perempuan. Indikator-indikator yang digunakan harus sensitif gender dan mampu menangkap keragaman pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Sistem ini juga perlu dilengkapi dengan mekanisme umpan balik dari masyarakat, khususnya kelompok perempuan, untuk memastikan akuntabilitas implementasi program.

Keempat, penguatan mekanisme koordinasi antar instansi melalui pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim koordinasi ini harus dipimpin oleh pejabat setingkat sekretaris daerah dengan anggota dari semua perangkat daerah terkait. Tim ini harus memiliki mandat yang jelas dan kewenangan untuk memastikan integrasi gender dalam semua kebijakan sektoral. Untuk mendukung kerja tim koordinasi ini, perlu dikembangkan sistem informasi gender berbasis web yang dapat diakses oleh semua perangkat daerah.

Kelima, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan, dalam implementasi kebijakan gender. Forum Gender Daerah perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih formal dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif bukan hanya konsultasi pasif. Organisasi perempuan juga perlu dilibatkan secara langsung dalam monitoring implementasi program gender di tingkat lapangan. Untuk mendukung partisipasi ini, pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan finansial dan teknis bagi organisasi perempuan.

Keenam, pengembangan sistem pelatihan dan pendidikan gender yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintah daerah. Sistem ini harus mencakup pelatihan dasar untuk semua aparatur dan pelatihan lanjutan bagi pejabat yang terlibat langsung dalam perencanaan dan implementasi program gender. Materi pelatihan harus dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan budaya lokal dan tantangan khas di DIY. Untuk memastikan keberlanjutan, sistem ini perlu diintegrasikan dengan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang sudah ada.

Implementasi strategi-strategi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota di lima kabupaten/kota. Tanpa dukungan politik yang jelas, penguatan kelembagaan gender akan sulit terwujud secara efektif. Oleh karena itu, advokasi kepada pimpinan daerah tentang pentingnya kesetaraan gender bagi pembangunan berkelanjutan di DIY menjadi langkah krusial yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

2.8 Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJMD 2025-2029

Pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan merupakan tujuan utama dari agenda pembangunan global maupun nasional. Dalam konteks ini, kesetaraan gender menjadi salah satu pilar fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam setiap perencanaan pembangunan. Kesetaraan gender bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga prasyarat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu daerah dengan karakteristik budaya dan adat istimewa yang khusus, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan daerahnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2023-2027 sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan seharusnya menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender di wilayah ini.

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kesetaraan gender telah diintegrasikan ke dalam RPJMD DIY 2023-2027. Fokus utama analisis meliputi: evaluasi kebijakan dan program berbasis gender dalam dokumen RPJMD, analisis kesenjangan antara komitmen kebijakan dengan implementasi di lapangan, serta penilaian terhadap efektivitas alokasi anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan.

Konteks keistimewaan Yogyakarta dengan sistem pemerintahan berbasis budaya dan adat Jawa menambah kompleksitas implementasi kebijakan gender. Budaya Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki seringkali menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender, sekaligus juga menawarkan potensi unik melalui nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan.

Urgensi analisis ini semakin meningkat mengingat DIY masih menghadapi berbagai indikator ketimpangan gender yang signifikan. Meskipun telah mengalami peningkatan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY pada tahun 2022 berada pada angka 94,99 yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumberdaya pembangunan.

2.9 RPJMD DIY 2022-2027 dan Pembangunan Berbasis Gender

RPJMD DIY 2022-2027 mengusung visi “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja Melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2)

Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) Good-governance pada berbagai tingkatan. Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMD DIY 2022-2027 menetapkan empat misi pembangunan:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Dari kelima misi tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesetaraan gender. Pada misi pertama tentang sumber daya manusia, terdapat penekanan pada penguatan kualitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara pada misi kedua tentang ekonomi, terdapat arah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan melalui penguatan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh perempuan.

2.10 Integrasi Dimensi Gender dalam Program Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027

Salah satu bidang utama yang menyentuh dimensi gender adalah pemberdayaan perempuan. Dalam RPJMD DIY 2022-2027, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk memfokuskan program pengarusutamaan gender yang bertujuan meningkatkan peran serta perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas perempuan sebagai tenaga profesional, dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan politik. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, menandakan keberhasilan intervensi yang dilakukan, meskipun masih terdapat kendala budaya dan dukungan politik yang perlu diatasi.

Upaya penguatan ini didukung oleh program-program afirmatif yang mendorong perempuan untuk menduduki posisi struktural dan jabatan manajerial, serta keterlibatan aktif dalam parlemen dan organisasi sosial. Strategi ini konsisten dengan semangat Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 yang mengamanatkan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

1. Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak

Sebagai bagian dari dimensi gender, perlindungan anak menjadi fokus penting dalam RPJMD DIY. Program perlindungan anak berfokus pada pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialami anak-anak, terutama perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk juga mengelola program yang memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

Selain itu, program perlindungan anak diarahkan untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan komunitas, serta meningkatkan akses anak-anak terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Intervensi ini penting untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat dan produktif serta bebas dari kekerasan berbasis gender.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dimensi gender juga diintegrasikan dalam program pengendalian penduduk dan program keluarga berencana (KB). RPJMD DIY menyusun strategi pembinaan dan peningkatan layanan KB yang inklusif gender, dengan memberikan akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga. Program ini berupaya meningkatkan kualitas keluarga melalui penyuluhan dan pembinaan yang menekankan peran perempuan sebagai penggerak utama kesejahteraan keluarga sekaligus menjaga kesetaraan peran dalam rumah tangga.

Pentingnya program ini terletak pada hubungan erat antara pengelolaan pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan KB yang responsif gender membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Perlindungan dan Jaminan Sosial

RPJMD DIY juga menaruh perhatian pada aspek perlindungan dan jaminan sosial yang membidik kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Program perlindungan sosial ini memberikan bantuan yang bersifat preventif dan kuratif, seperti bantuan pangan, akses kesehatan, dan pendampingan sosial. Perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan kelompok yang terpinggirkan agar dapat mandiri dan produktif.

Pelaksanaan program ini melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi perempuan untuk memastikan perlindungan dan peluang pemberdayaan menyasar secara tepat dan efektif. Hal ini juga memperkuat ketahanan sosial dan mengurangi ketimpangan gender dalam aspek sosial ekonomi.

4. Kesehatan yang Responsif Gender

Bidang kesehatan menjadi komponen penting dalam dimensi gender RPJMD DIY. Program kesehatan merangkul isu-isu spesifik gender, termasuk penanganan stunting yang menjadi salah satu prioritas nasional dan daerah. Pemerataan akses layanan kesehatan kepada perempuan, ibu hamil, dan anak-anak menjadi fokus utama agar tercapai kualitas hidup yang lebih baik dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Pelayanan kesehatan yang responsif gender juga berarti memperhatikan kebutuhan kesehatan khusus perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Pendekatan komprehensif ini menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.11 Penguatan Kebijakan dan Sinergi Program

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program dimensi gender, RPJMD DIY memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sinergi antara Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, organisasi perempuan, dan partai politik diupayakan agar saling mendukung dalam meningkatkan kapasitas perempuan dan memperkuat keterwakilan perempuan di lembaga publik. Kendala yang masih dihadapi, seperti dikotomi ruang publik dan privat, budaya patriarki, serta keterbatasan dukungan partai politik, menjadi isu strategis yang terus diatasi melalui edukasi, pelatihan, dan advokasi kebijakan.

Dimensi gender dalam RPJMD DIY 2022-2027 bukan sekadar aspek tambahan, melainkan bagian penting dan strategis dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, jaminan sosial, dan kesehatan responsif gender, DIY berkomitmen mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan kesetaraan gender sebagai fondasinya. Keberhasilan tersebut membutuhkan dukungan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sinergi multisektoral yang kuat.

BAB III

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER

3.1 Area Prioritas 1 : Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Area prioritas ini merupakan fondasi esensial dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender Provinsi DIY. Intervensi di sektor kesehatan dan pendidikan dipandang sebagai prasyarat utama untuk pemberdayaan perempuan, karena keduanya berfungsi sebagai "enabler" atau pemungkin bagi kemajuan sosial. Pendidikan adalah instrumen krusial untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi, membuka partisipasi ekonomi dan politik, serta memberikan otonomi bagi perempuan untuk mengambil keputusan atas hidup mereka. Sementara itu, kesehatan, khususnya kesehatan seksual dan reproduksi, adalah hak asasi manusia yang mendasar; tanpa kesejahteraan fisik dan mental, partisipasi penuh di sektor lain menjadi mustahil. Dokumen rencana aksi ini disusun dalam format matriks teknokratis yang rinci, menerjemahkan tujuan-tujuan luhur tersebut ke dalam program, kegiatan, indikator capaian spesifik, dan target tahunan yang terukur untuk sisa periode 2022-2027 serta 2027-2032. Struktur ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas yang jelas, dengan mendelegasikan tanggung jawab kepada dinas-dinas terkait, terutama Perangkat Daerah yang mengampu urusan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan Perangkat Daerah Pengampu urusan Kesehatan di DIY

Berikut adalah strategi dan indikator untuk mewujudkan prioritas ini:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan (Target 1.A.1)
 - a. Tujuan: Menjamin peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh warga, dengan fokus pada kelompok rentan.
 - b. Strategi: Intervensi finansial melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri. Pendekatan ini merupakan implementasi fundamental dari penganggaran yang responsif gender (gender-responsive budgeting). Meskipun BOSDA pada dasarnya bersifat netral gender karena diberikan kepada institusi, dampaknya sangat pro-gender kesetaraan. Hambatan ekonomi terbukti menjadi salah satu alasan utama tingginya angka putus sekolah di kalangan anak perempuan pada jenjang pendidikan menengah. Dengan menggratiskan atau mengurangi beban biaya sekolah melalui BOSDA, rencana ini secara langsung mengatasi hambatan struktural tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi murni dan angka retensi siswa perempuan di jenjang SMA/SMK.
 - c. Indikator: Alokasi target yang stabil untuk ratusan satuan pendidikan setiap tahunnya, menunjukkan komitmen anggaran jangka panjang yang esensial.
2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Penguatan Iklim Inklusivitas (Target 1.A.2)
 - a. Tujuan: Meningkatkan kompetensi pendidik dan penguatan iklim inklusivitas di satuan pendidikan. Kualitas interaksi di dalam kelas dan sensitivitas pendidik terhadap isu gender dan kerentanan lainnya diakui sebagai faktor penentu keberhasilan pendidikan.

b. Strategi:

- 1) Mobile Learning Service (MLS): Ditargetkan untuk meningkatkan literasi digital tenaga pendidik, memastikan mereka siap menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
- 2) Bimbingan Teknis Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK): Langkah ini sangat penting karena menunjukkan adanya pemahaman interseksional dalam penyusunan rencana, tidak hanya menyasar "perempuan" sebagai kelompok monolitik, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada "anak perempuan dengan disabilitas" atau "anak dengan kerentanan ganda".
- 3) Program Beasiswa Terarget: Seperti Beasiswa Retrieval dan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus, yang secara eksplisit menyasar peserta didik dari keluarga miskin atau penyandang disabilitas, memastikan bahwa kelompok paling rentan tidak tertinggal.

3. Penanganan Angka Putus Sekolah dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah (Target 1.A.3)

- a. Tujuan: Secara eksplisit mengidentifikasi dan merumuskan strategi untuk menangani isu-isu kritis yang menjadi penghalang utama partisipasi perempuan dalam pendidikan, yakni angka putus sekolah dan kekerasan di lingkungan sekolah. Kekerasan berbasis gender, termasuk perundungan dan pelecehan seksual, merupakan faktor pendorong signifikan yang menyebabkan anak perempuan putus sekolah atau orang tua menghentikan pendidikan mereka karena alasan keamanan.

b. Strategi:

- 1) Sosialisasi dan Penguatan Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS): Sejalan dengan amanat Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023, intervensi ini bertujuan mengubah penanganan kekerasan dari yang bersifat ad-hoc dan reaktif menjadi sistematis dan preventif, menciptakan lingkungan "sekolah aman" (safe school).
- 2) Beasiswa Segera Berpusaka: Menargetkan anak putus sekolah untuk kembali ke jalur pendidikan non-formal dengan keterampilan kejuruan.
- 3) Program Vokasi Adaptif dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Kombinasi ini menghubungkan pendidikan tidak hanya dengan keamanan, tetapi juga dengan pemberdayaan ekonomi pasca-sekolah.

4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi dan Responsif Gender (Target 1.B.1)

- a. Tujuan: Membangun fondasi sistem pelayanan kesehatan yang kuat di sisi penawaran (supply-side).

- b. Strategi: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan responsif gender. Ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah standar operasional yang menuntut fasilitas kesehatan untuk menjamin privasi (penting untuk layanan kesehatan reproduksi), dikelola oleh staf yang tidak diskriminatif, dan menyediakan layanan esensial yang dibutuhkan perempuan.

- c. Indikator: Peningkatan jumlah fasilitas yang menerapkan Indikator Nasional Nasional Mutu (INM) secara progresif hingga tahun 2032.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Target 1.B.4)
 - a. Tujuan: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Jika fasilitas adalah perangkat keras, SDM adalah perangkat lunaknya.
 - b. Strategi: Alokasi sumber daya untuk pelatihan kompetensi teknis dan, yang lebih penting, pelatihan sensitivitas gender. Pelatihan ini krusial untuk membongkar bias, baik yang disadari maupun tidak, di antara penyedia layanan, memastikan bahwa pasien perempuan diperlakukan dengan hormat dan kebutuhan spesifik mereka termasuk sebagai korban kekerasan dapat dikenali dan ditangani secara memadai.
6. Promosi Hidup Sehat yang Responsif Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Target 1.B.2 & 1.B.5)
 - a. Tujuan: Menggeser paradigma dari model kuratif (menunggu pasien di rumah sakit) ke model promotif-preventif (menjemput bola ke komunitas).
 - b. Strategi: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, dengan target ambisius untuk mengunjungi ratusan ribu keluarga setiap tahunnya. Pendekatan kunjungan rumah oleh tenaga Puskesmas ini terbukti sangat pro-perempuan. Intervensi ini mampu menjangkau perempuan yang mungkin terisolasi secara sosial, memiliki mobilitas terbatas karena tanggung jawab pengasuhan, atau tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk proaktif mencari layanan. Kunjungan ini berfungsi sebagai intervensi garis depan untuk deteksi dini masalah kesehatan ibu, pemantauan gizi anak, dan pencegahan stunting, yang semuanya merupakan inti dari kesehatan gender.
7. Penanganan Isu-isu Kesehatan Seksual dan Reproduksi (Kespro)
 - a. Tujuan: Menangani isu-isu yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan, otonomi tubuh, dan kelangsungan hidup perempuan.
 - b. Strategi:
 - 1) Deteksi Dini Kanker: Melakukan skrining Kanker serviks dan Payudara setiap 3 tahun sekali pada perempuan usia 30-69 tahun dengan target capaian 75%. Ini adalah intervensi kesehatan masyarakat berdampak tinggi yang secara langsung dapat menyelamatkan nyawa perempuan.
 - 2) Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi di Sekolah (Target 1.B.8): Mengamanatkan penyusunan materi dan internalisasi kurikulum tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah. Langkah ini sangat strategis untuk memberdayakan generasi muda perempuan dengan pengetahuan untuk melindungi diri mereka, memahami tubuh mereka, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab.
8. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting (Target 1.B.6)
 - a. Tujuan: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting, yang dirinci dengan sangat komprehensif. Strategi ini menyerang "tiga keterlambatan" yang menyebabkan kematian ibu melalui tiga pilar: tata kelola, kualitas layanan, dan akses.
 - b. Strategi:

- 1) Tata Kelola: Mencakup Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) serta penyediaan pedoman (Buku KIA).
- 2) Kualitas Layanan: Fokusnya adalah penguatan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di Puskesmas dan PONEK (di Rumah Sakit).
- 3) Akses: Intervensi paling pro-perempuan terlihat pada pilar ini. Rencana ini menargetkan "Pemeriksaan kehamilan dengan standar 12 T termasuk USG... dan minimal 6 kali selama kehamilan", yang melebihi standar minimal WHO.
- 4) Hulu: Intervensi hulu dilakukan melalui "Skrining layak hamil pada calon pengantin) dan pasangan usia subur", sebuah langkah progresif untuk memastikan perempuan berada dalam kondisi kesehatan prima, misalnya tidak anemia, bahkan sebelum terjadi kehamilan.

9. Pendekatan Siklus Hidup Holistik

- a. Tujuan: Mengadopsi pendekatan siklus hidup (life-cycle approach) yang holistik, melampaui fokus tradisional pada ibu dan anak.
- b. Strategi: Dokumen ini secara eksplisit mencantumkan program untuk "pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif", "usia lanjut", dan "Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)". Pengakuan terhadap kesehatan jiwa sangat relevan, mengingat perempuan seringkali menanggung beban kesehatan mental yang tidak proporsional akibat tekanan sosial dan domestik. Selain itu, rencana ini mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana melalui "Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)" dan "Public Safety Center (PSC 119)", sebuah langkah penting yang mengakui bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia adalah kelompok yang paling rentan selama dan pasca-bencana.

3.2 Area Prioritas 2 : Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Area Prioritas 2 dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meletakkan fondasi krusial bagi upaya dekonstruksi hambatan struktural dan kultural yang selama ini membatasi partisipasi perempuan. Dengan tajuk "Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan", area ini secara eksplisit mengidentifikasi tiga pilar yang saling terkait dan bersifat kausal. Kepemimpinan perempuan dalam ranah pengambilan keputusan tidak dapat terwujud secara substantif tanpa didahului oleh penguatan kapasitas individu dan kelembagaan, serta kemandirian, terutama dalam aspek ekonomi. Kapasitas dan kemandirian adalah prasyarat fundamental bagi agensi (agency) perempuan untuk berpartisipasi setara dalam arena publik dan politik.

Analisis terhadap dokumen perencanaan matriks Area Prioritas 2 menunjukkan sebuah kerangka kerja yang terstruktur, logis, dan terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan operasional yang menerjemahkan visi besar kesetaraan gender menjadi serangkaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang konkret. Struktur matriks ini memetakan secara rinci setiap sasaran strategis dengan indikator kinerja, target tahunan yang kuantitatif, serta penanggung jawab pelaksana di tingkat Organisasi Perangkat Daerah

(OPD). Keterkaitan ini memungkinkan adanya akuntabilitas dan proses monitoring-evaluasi yang ketat. Analisis mendalam terhadap matriks ini mengidentifikasi enam sasaran spesifik (2.A hingga 2.F) yang secara kolektif dirancang untuk mencapai tujuan utama Area Prioritas 2, yang mencakup intervensi di ranah ekonomi, politik, hukum, sosial, hingga digital.

Berikut adalah strategi dan indikator untuk mewujudkan prioritas ini:

1. Tersedianya Skema Bantuan bagi Perempuan Miskin, Perempuan Kepala Keluarga, dan Perempuan dengan Kerentanan Lainnya (Sasaran 2.A)
 - a. Tujuan: Memperkuat pilar kemandirian melalui penyediaan skema bantuan yang spesifik dan afirmatif bagi kelompok perempuan paling rentan. Sasaran ini menunjukkan sensitivitas gender yang tinggi dengan mengidentifikasi secara spesifik kelompok paling rentan, yaitu perempuan miskin dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Intervensi ini tidak bersifat generik, melainkan dirancang sebagai jaring pengaman ekonomi yang afirmatif.
 - b. Strategi: Pelaksanaan melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan sub-kegiatan "Hibah KEP Desa PRIMA" (Kelompok Ekonomi Perempuan Desa Prioritas). Pilihan untuk menyasar "kelompok" alih-alih "individu" merupakan strategi yang cerdas. Ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga mendorong terbentuknya kemandirian kolektif, akuntabilitas bersama (social accountability), dan ekosistem usaha yang saling mendukung di tingkat komunal desa.
 - c. Indikator: Target yang ditetapkan adalah 5 kelompok per tahun.
 - d. Penanggung Jawab: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2).
2. Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Politik, Hukum, Sosial, serta Pengambilan Keputusan dalam Pembangunan melalui Pelatihan dan Metode Lainnya untuk Perempuan (Sasaran 2.C)
 - a. Tujuan: Meningkatkan kapasitas individu perempuan serta memperkuat organisasi dan kelembagaan yang menaungi perempuan, sebagai inti dari pilar penguatan kapasitas.
 - b. Strategi: Dokumen perencanaan ini menguraikan strategi jalur ganda (dual-track strategy) yang melibatkan dua OPD.
 - 1) Jalur Pertama (DP3AP2): Berfokus pada penguatan human capital secara langsung melalui sub-kegiatan "Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan", bersifat *demand-side* untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu perempuan.
 - 2) Jalur Kedua (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Bakesbangpol): Bersifat lebih struktural atau *supply-side* melalui sub-kegiatan "Menguatkan koordinasi kelembagaan kelompok/organisasi masyarakat", berfokus pada penguatan organisasi dan kelembagaan yang menaungi perempuan.
 - c. Indikator: Total 185 orang per tahun menjadi target dari program gabungan ini, menunjukkan komitmen substansial untuk peningkatan kapasitas.
3. Terdiseminasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Berbagai

Kebijakan yang Berhubungan dengan Perempuan serta Kelompok Rentan (Sasaran 2.D)

- a. Tujuan: Menyentuh aspek vital dalam partisipasi politik, yaitu literasi politik. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan adanya pemahaman yang utuh mengenai hak, proses, dan substansi kebijakan.
- b. Strategi: Bakesbangpol, sebagai OPD penanggung jawab, merumuskan program ini melalui sub-kegiatan "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Perempuan" serta "Menguatkan kepemimpinan perempuan dengan menjangkau lintas wilayah". Program ini adalah fondasi esensial sebelum perempuan dapat melangkah lebih jauh ke peran kepemimpinan formal, baik di legislatif, eksekutif, maupun di level pengambilan kebijakan lainnya.
- c. Indikator: Target yang ditetapkan sangat ambisius, yakni menjangkau 500 orang per tahun, mengindikasikan sebuah program diseminasi informasi dan pendidikan politik skala besar.
- d. Penanggung Jawab: Bakesbangpol.

4. Meningkatnya Literasi, Pemahaman, dan Pengetahuan Perempuan untuk Mengurangi Digital Divide (Sasaran 2.E)

- a. Tujuan: Mengidentifikasi tantangan baru di era kontemporer, di mana kapasitas, kemandirian, dan partisipasi tidak dapat dipisahkan dari akses dan literasi digital. Kesenjangan digital merupakan bentuk baru dari eksklusif sosial.
- b. Strategi: Penanggung jawabnya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), namun intervensinya bukanlah pelatihan digital langsung kepada perempuan (*demand-side*). Sebaliknya, intervensi yang dipilih adalah "Peningkatan kualitas layanan informasi publik di OPD Pemda DIY". Hipotesisnya adalah dengan memperbaiki kualitas, keterbukaan, dan aksesibilitas informasi di seluruh layanan pemerintah, maka akses informasi bagi seluruh warga—termasuk perempuan—akan membaik secara sistemik, yang pada gilirannya akan turut mengurangi kesenjangan digital.
- c. Indikator: Keberhasilannya diukur dari "Jumlah OPD dengan predikat informatif", dengan target peningkatan dari 40% menjadi 45%.
- d. Penanggung Jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

5. Terbentuknya Karakter Perempuan yang Memiliki Kepercayaan Diri dalam Mendorong Keterlibatan pada Berbagai Proses Pengambilan Kebijakan (Sasaran 2.F)

- a. Tujuan: Menyentuh dimensi internal atau psikologis dari kepemimpinan. Perencanaan ini menunjukkan pemahaman yang matang bahwa keterampilan teknis (*hard skills*) yang diperoleh dari pelatihan kapasitas (2.C) dan literasi politik (2.D) tidak akan memadai jika tidak didukung oleh agensi internal, keberanian, dan kepercayaan diri (*soft skills*) untuk berbicara dan mengambil posisi dalam proses kebijakan. Hambatan psikologis dan internalisasi subordinasi seringkali menjadi penghalang yang lebih besar daripada ketiadaan kapasitas teknis.
- b. Strategi: DP3AP2 merancang sub-kegiatan "Pelatihan kepemimpinan perempuan". Ini kemungkinan besar adalah program pelatihan kepemimpinan yang spesifik, mungkin berbasis kohort, yang dirancang

secara mendalam untuk membangun karakter dan kepercayaan diri kader-kader pemimpin perempuan masa depan.

- c. Indikator: Diukur berdasarkan "Jumlah pelatihan kepemimpinan perempuan", dengan target konsisten "1 kali kegiatan" per tahun.
- d. Penanggung Jawab: DP3AP2.

3.3 Area Prioritas 3 : Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Area Prioritas 3 untuk Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan Yogyakarta yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuannya yaitu Menghilangkan hambatan struktural dan kultural bagi perempuan untuk masuk dan berkembang di dunia kerja, Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta Menciptakan ekosistem usaha dan ketenagakerjaan yang responsif gender. Agenda ini dilakukan dengan mewujudkan tujuan strategis dan indikator sebagai berikut

1. Meningkatkan Akses dan Keterampilan Perempuan di Sektor Ekonomi Strategis. Melalui indikator: meningkatnya jumlah perempuan yang tersertifikasi kompetensi di sektor formal dan informal; Terselenggaranya minimal 5 program pelatihan kewirausahaan dan digital marketing bagi UMKM perempuan per tahun; dan Meningkatnya proporsi perempuan yang mengakses kredit usaha (KUR dan non-KUR).
2. Memperluas Kesempatan Kerja yang Layak dan Ramah Keluarga Melalui indikator: Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah keluarga (fleksibel, ruang laktasi, cuti parental); Tersedianya pusat penitipan anak (PPA) di kawasan industri dan perkantoran pemerintah; dan Menurunnya kesenjangan upah (gender pay gap) di sektor formal.
3. Mengurangi Beban Ganda Perempuan melalui Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Perawatan. Melalui indikator: Meningkatnya jumlah layanan *care economy* (penitipan anak, lansia, disabilitas) yang terjangkau dan berkualitas di komunitas; dan Tersusunnya peta jalan pengembangan *care economy* di DIY.
4. Memperkuat Kepemimpinan dan Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi. Melalui indikator Meningkatnya jumlah perempuan dalam posisi manajerial, dewan direksi, dan asosiasi pengusaha; dan Tersusunnya data terpilah (gender-disaggregated data) untuk perencanaan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

3.4 Area Prioritas 4 : Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan

Area prioritas 4 ini ditujukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di seluruh wilayah DIY. Hal ini ditujukan untuk Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan kultural dan struktural, Memperkuat sistem penjangkauan, perlindungan, dan pemulihan yang terintegrasi dan responsif gender bagi perempuan korban kekerasan serta Meningkatkan penegakan hukum yang adil dan sensitif gender bagi korban kekerasan.

Strategi dan indikator yang digunakan untuk menuju ke pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan yaitu:

1. Memperkuat Sistem Pencegahan Kekerasan Berbasis Keluarga dan Komunitas dengan indikator Meningkatnya jumlah "Kampung Ramah Perempuan dan Anak" (KRA) di setiap kabupaten/kota.; Terselenggaranya kampanye publik dan edukasi pencegahan kekerasan di minimal 50 lokasi per tahun; dan Meningkatnya kapasitas kader dan tokoh masyarakat dalam identifikasi dan respons dini kekerasan.
2. Memperkuat Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan (Pusat Pelayanan Terpadu/PPT) dengan indikator Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di semua PPT kabupaten/kota; Meningkatnya jumlah korban yang mengakses layanan di PPT (konseling, medis, hukum, reintegrasi) minimal 20% per tahun; Tersedianya layanan 24 jam (hotline dan crisis center).
3. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Sensitif Gender dengan indikator Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan yang berkekuatan hukum tetap; Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani kekerasan terhadap perempuan di kepolisian; dan Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum (APH) tentang penanganan kasus berbasis gender.
4. Memperkuat Sistem Pemulihan Jangka Panjang dan Pemberdayaan Ekonomi Korban dengan indikator Tersedianya program pemulihan trauma (psikologis) yang berkelanjutan bagi korban; Meningkatnya jumlah mantan korban yang mandiri secara ekonomi melalui program kewirausahaan atau penempatan kerja.; dan Tersedianya data terpilah dan sistem informasi kekerasan terhadap perempuan (SIMFONI PPA) yang terupdate.

3.5 Area Prioritas 5 : Penguatan Penyelenggaraan PUG di Proses Pembangunan

Area prioritas 5 bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di DIY. yang dilaksanakan dengan cara Memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan PUG yang efektif dan berkelanjutan, Meningkatkan kapasitas dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan PUG, Membangun sistem data dan akuntabilitas yang mendukung evidence-based policy dalam PUG. Strategi dan indikator untuk mewujudkan prioritas 5 ini antara lain:

1. Memperkuat Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan PUG dengan indikator Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG di Seluruh OPD; Terbentuknya dan aktif berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) PUG di seluruh OPD dan kabupaten/kota; dan Tersusunnya RAD PUG DIY dan RAD PUG Kabupaten/Kota yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Pemangku Kepentingan dalam PUG dengan indikator Terlatihnya minimal 2 Fasilitator PUG Percontohan di setiap OPD utama; Terselenggaranya pelatihan PUG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi 100% perencana dan penganggaran di OPD; dan Minimal 50% dari dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra OPD) telah mengintegrasikan analisis gender.

3. Menerapkan Penganggaran Responsif Gender (ARG) secara Sistemik dengan indikator Meningkatnya persentase alokasi ARG dalam APBD DIY setiap tahunnya; Seluruh OPD wajib menyertakan Minimal 1 Program/Kegiatan Berlabel ARG dalam RKA-KL; dan Tersedianya buku panduan dan instrumen pemantauan ARG yang mudah diaplikasikan.
4. Membangun Sistem Data dan Informasi Gender yang Terintegrasi dengan indikator Terpublikasinya Profil Gender dan Analisis Kesenjangan Gender (AKG) DIY setiap 2 tahun sekali; Terintegrasinya indikator data terpilah (*gender-disaggregated data*) dalam sistem perencanaan (e-Planning) DIY; dan Tersedianya *dashboard* informasi gender yang dapat diakses publik.
5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja PUG dengan indikator Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kinerja PUG secara rutin dan partisipatif; Terintegrasinya indikator kinerja PUG dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DIY; Terpublikasinya Laporan Akuntabilitas Kinerja PUG DIY setiap tahun.

Strategi implementasi dan penjaminan berkelanjutan pelaksanaan RAD PUG ini dilaksanakan melalui

1. Komitmen Politik Pimpinan Tertinggi: Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menjadi kunci utama, yang diwujudkan melalui Instruksi Gubernur atau Surat Edaran untuk mendorong implementasi PUG dan ARG di semua OPD.
2. Pendekatan Holistik dan Sistematis: Penerapan PUG tidak hanya sebagai proyek tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari siklus pembangunan daerah, dari perencanaan hingga evaluasi.
3. Kemitraan Strategis dengan Triple Helix: Melibatkan secara sinergis antara Pemerintah, Akademisi/Universitas (sebagai pusat kajian dan inovasi), dan Dunia Usaha/CSR (sebagai sumber pendanaan dan praktik baik).
4. Komunikasi dan Diseminasi yang Masif: Mensosialisasikan keberhasilan, praktik baik, dan manfaat PUG kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membangun dukungan publik.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender Provinsi DIY merupakan kerangka kerja strategis yang dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam seluruh siklus pembangunan daerah. Bab ini merinci bagaimana komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) akan diterjemahkan menjadi tindakan konkret, memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan mempertimbangkan kebutuhan dan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Sinkronisasi dengan visi dan misi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, khususnya Bab I tentang Pendahuluan dan Bab II tentang Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPD dan RPJMD, menjadi landasan utama dalam perumusan mekanisme ini.

4.1 Mekanisme Pelaksanaan di Proses Pembangunan Tahunan

Pelaksanaan RAD Pembangunan Kesetaraan Gender akan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam semua dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ini berarti bahwa isu dan analisis gender tidak lagi menjadi lampiran atau pertimbangan sekunder, melainkan menjadi elemen inti yang dipertimbangkan sejak awal perumusan kebijakan. Secara spesifik, integrasi ini akan dilakukan pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY : Sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan, RPJMD akan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan dimensi gender. Setiap indikator kinerja akan dianalisis dari perspektif gender untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan intervensi yang responsif. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD DIY 2022–2027 yang telah menegaskan kesetaraan gender sebagai elemen penting dalam mewujudkan visi Gubernur DIY untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan: RKPD, sebagai penjabaran operasional dari RPJMD, akan memastikan bahwa program dan kegiatan yang dianggarkan setiap tahunnya telah melalui analisis gender. Ini mencakup identifikasi penerima manfaat (perempuan dan laki-laki), dampak yang diharapkan, serta alokasi sumber daya yang adil.

Untuk memperkuat dasar hukum dan pedoman operasional pelaksanaan PUG, Pemerintah Provinsi DIY akan menerbitkan instrumen kebijakan yang mengikat:

1. Surat Edaran Gubernur DIY: Dokumen ini akan berfungsi sebagai payung kebijakan yang menegaskan komitmen pimpinan daerah terhadap PUG dan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek tugas dan fungsinya. Surat Edaran ini akan memberikan arahan strategis dan politis yang diperlukan untuk memastikan PUG menjadi prioritas di seluruh tingkatan pemerintahan.
2. Surat Kepala Bappeda DIY: Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bappeda) DIY

akan mengeluarkan surat edaran teknis yang berisi pedoman rinci mengenai pengembangan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Surat ini akan mencakup metodologi analisis gender, format penyusunan Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB), serta mekanisme pelaporan yang terstandar. Hal ini sejalan dengan peran Bappeda yang sentral dalam integrasi gender dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana disebutkan dalam Bab II.

Peran Provinsi DIY juga sangat krusial dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Pembinaan ini bertujuan untuk:

1. Sinkronisasi Pelaksanaan: Memastikan bahwa program dan kegiatan PUG yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota selaras dengan strategi dan tujuan yang ditetapkan dalam RAD PUG Provinsi DIY. Ini akan mencegah duplikasi upaya dan memastikan efisiensi sumber daya.
2. Penganggaran Responsif Gender: Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan penganggaran responsif gender, termasuk identifikasi program/kegiatan berlabel ARG, analisis Gender Budget Statement (GBS), dan pemantauan alokasi anggaran.

Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam perencanaan responsif gender merupakan investasi jangka panjang yang esensial. Upaya ini akan terus dilakukan melalui:

1. Pemanfaatan Data Pilah Gender: Mengoptimalkan penggunaan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (gender-disaggregated data) sebagai dasar analisis dan perumusan kebijakan. Data ini mencakup Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta data sektoral lainnya yang relevan, sebagaimana dibahas dalam Bab II. Pemanfaatan data yang akurat akan memungkinkan identifikasi kesenjangan gender yang spesifik dan perumusan intervensi yang tepat sasaran.
2. Pelatihan Analisis Data Gender: Secara berkala menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data gender. Pelatihan ini akan mencakup teknik-teknik analisis gender, penyusunan profil gender, serta penggunaan data untuk advokasi kebijakan.

4.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan RAD Pembangunan Kesetaraan Gender

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi keberlanjutan dan keberhasilan RAD Pembangunan Kesetaraan Gender. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat legitimasi, relevansi, dan efektivitas program-program yang dijalankan. Pendekatan yang diadopsi adalah model pentahelix, yang mengintegrasikan peran dan kontribusi dari lima elemen utama:

1. Pemerintah: Sebagai inisiator dan fasilitator utama, pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan PUG.

2. Akademisi/Universitas: Lembaga pendidikan tinggi dan pusat kajian berperan sebagai sumber pengetahuan, inovasi, dan penelitian. Mereka akan memberikan dukungan dalam bentuk analisis gender yang mendalam, pengembangan metodologi, evaluasi program, serta penyediaan data dan bukti empiris untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.
3. Dunia Usaha/Bisnis: Sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja yang setara, menerapkan kebijakan ramah keluarga, serta menyediakan dukungan finansial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk inisiatif PUG. Keterlibatan dunia usaha juga mencakup pengembangan kewirausahaan perempuan dan peningkatan akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perempuan.
4. Komunitas/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): Organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang gender, serta kelompok masyarakat lainnya merupakan agen perubahan di tingkat akar rumput. Mereka berperan dalam melakukan advokasi kebijakan, memberikan layanan langsung kepada perempuan korban kekerasan, menyelenggarakan program pemberdayaan, serta memobilisasi partisipasi masyarakat. Forum Gender Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Bab II, akan menjadi wadah penting untuk koordinasi dan sinergi dengan OMS.
5. Media: Media massa (cetak, elektronik, dan digital) memiliki kekuatan besar sebagai agen perubahan. Mereka berperan dalam menyebarkan informasi mengenai isu-isu kesetaraan gender, meningkatkan kesadaran publik, menyoroti praktik-praktik baik, serta mengadvokasi kebijakan yang responsif gender. Keterlibatan media akan membantu membentuk opini publik yang mendukung PUG dan melawan stereotip gender.

Dalam kerangka model pentahelix ini, beberapa aspek partisipasi masyarakat akan menjadi fokus utama:

1. Pemberdayaan Perempuan: Program-program akan dirancang untuk secara langsung memberdayakan perempuan di berbagai bidang, termasuk peningkatan kapasitas ekonomi seperti melalui program Hibah KEP Desa PRIMA yang, penguatan kepemimpinan, dan peningkatan literasi digital. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan agensi perempuan dalam mengambil keputusan di ranah privat maupun publik.
2. Media sebagai Agen Perubahan: Media akan didorong untuk secara proaktif mempublikasikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai isu-isu gender, serta mempromosikan narasi positif tentang peran perempuan dalam pembangunan. Pelatihan bagi jurnalis tentang peliputan isu gender yang sensitif dan non-diskriminatif juga akan menjadi bagian dari upaya ini.
3. Komunitas Lokal: Pelibatan komunitas lokal akan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pembentukan "Kampung Ramah Perempuan dan Anak" (KRA) dan penguatan peran kader di tingkat desa/kelurahan. Komunitas akan menjadi garda terdepan dalam identifikasi masalah, pelaksanaan program, serta pemantauan dampak di tingkat lokal.

Melalui mekanisme pelaksanaan yang terintegrasi, didukung oleh instrumen kebijakan yang kuat, pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam model pentahelix, diharapkan RAD Pembangunan Kesetaraan Gender Provinsi DIY dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan kesetaraan gender sebagai pondasinya.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi adalah komponen kunci dalam siklus manajemen RAD PUG. Sistem Monev yang baik akan memberikan informasi yang akurat tentang kemajuan, tantangan, dan keberhasilan pelaksanaan RAD PUG. Data dan temuan dari Monev akan menjadi dasar untuk pembelajaran, perbaikan berkelanjutan, dan akuntabilitas kepada publik. Tujuan pemantauan dan evaluasi, yaitu:

1. Memantau Kemajuan: Melacak sejauh mana indikator dan target dalam RAD PUG telah tercapai oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.
2. Mengevaluasi Dampak: Menilai kontribusi RAD PUG terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY.
3. Mengidentifikasi Hambatan: Mendeteksi kendala, tantangan, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan RAD PUG.
4. Menyediakan Bahan Pembelajaran: Menghasilkan rekomendasi dan praktik baik (best practices) untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan PUG di masa mendatang.
5. Meningkatkan Akuntabilitas: Menyajikan laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, legislatif, dan masyarakat.

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip dibawah ini:

1. Partisipatif: Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (OPD, CSO, akademisi, kelompok perempuan, dan masyarakat).
2. Transparan dan Akuntabel: Metode, data, dan hasil Monev dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.
3. Berorientasi pada Hasil (Result-Based): Fokus pada pencapaian outcome dan dampak, bukan hanya pada output.
4. Berkesinambungan: Dilakukan secara rutin (triwulan, semester, tahunan) selama periode RAD PUG.
5. Sensitif Gender: Metode dan alat Monev dirancang untuk menangkap perubahan relasi gender dan pengalaman yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

5.2 Para Multi Pihak

Peran multi pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi antara lain:

1. Tim Pokja PUG Provinsi DIY: Bertindak sebagai pelaksana utama, pengumpul data, dan penyusun laporan.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penanggung Jawab Program: Bertanggung jawab mengumpulkan dan melaporkan data kemajuan program/kegiatan mereka sesuai indikator RAD PUG.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY (Komisi yang membidangi Pemberdayaan Perempuan): Melakukan fungsi pengawasan dan menerima laporan kemajuan.
4. Kelompok Masyarakat Sipil (CSO) dan Akademisi: Berperan sebagai mitra kritis, partisipan dalam tim evaluasi independen, dan pemberi masukan.

5.3 Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Tabel 3. Tahapan Pementauan RAD PUG DIY

No	Tingkatan	Frekuensi	Mekanisme	Output
1	Pemantauan Rutin (oleh OPD)	Bulanan/ Triwulanan	OPD melaporkan kemajuan kegiatan dan capaian indikator melalui sistem pelaporan online (Aplikasi Monev RAD PUG DIY) atau formulir yang distandardisasi.	Laporan Kemajuan Triwulanan OPD.
2	Tinjauan Mid-Term (oleh Tim Pokja PUG DIY)	Pertengahan Masa RAD PUG	Mereview seluruh capaian, menganalisis tren, mengidentifikasi tantangan besar, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.	Laporan Tinjauan Mid-Term dan Rekomendasi Aksi Korektif

2. Evaluasi

Tabel 4. Tahapan Evaluasi RAD PUG DIY

Tingkatan	Frekuensi	Mekanisme	Output
Evaluasi Akhir (oleh Tim Independen)	Akhir Masa RAD PUG	Evaluasi mendalam terhadap efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan RAD PUG. Menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif)	Laporan Evaluasi Akhir dengan rekomendasi untuk RAD PUG periode berikutnya.

Melalui strategi, mekanisme, dan tahapan yang jelas ini, pemantauan RAD PUG DIY diharapkan dapat berjalan tertib, akuntabel, dan menjadi motor penggerak untuk percepatan pencapaian kesetaraan gender di DIY.

A. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2027

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB		CATATAN
							2026	2027				
1	PENINGKATAN AKSES LAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN											
1.A	Pendidikan Perempuan											
1.A.1	Terlaksananya Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru	118	118	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-	
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pemberian BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bagi SMA Negeri	Jumlah satuan pendidikan penerima BOSDA	69	69	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pemberian BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bagi SMK Negeri	Jumlah satuan pendidikan penerima BOSDA	49	49	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-	
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pemberian BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bagi SLB Negeri	Jumlah satuan pendidikan penerima BOSDA	9	9	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-	
1.A.2	Terlaksananya Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang responsif gender	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	100	100	Orang	Balai Tekkomdik Dinas Dikpora DIY	-	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	100	100	Orang	Balai Tekkomdik Dinas Dikpora DIY	-	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	100	100	Orang	Balai Tekkomdik Dinas Dikpora DIY	-	

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)	Bimbingan Teknis Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)	90	90	Orang	Dinas Dikpora DIY	-
1.A.3	Tersedianya Beasiswa bagi anak miskin atau disabilitas atau kerentanan lainnya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	Pemberian bantuan Beasiswa Retrieval	Jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan Beasiswa Retrieval	200	200	peserta didik	Dinas Dikpora DIY	-
					Pemberian bantuan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus	5054	4976	peserta didik	Dinas Dikpora DIY	-
1.A.4	Terlaksananya Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan bagi anak putus sekolah, korban bullying atau korban kekerasan berbasis gender	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	Pemberian bantuan Beasiswa Segera Berpusaka (Selamatkan Generasi Muda Berantas Putus Sekolah SMK)	Jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan Beasiswa Segera Berpusaka	25	25	peserta didik	Dinas Dikpora DIY	Diberikan kepada anak putus sekolah jenjang SMA/SMK untuk melanjutkan kembali ke pendidikan nonformal dengan tambahan pembelajaran ketrampilan kejuruan.
1.A.5	Terlaksananya Pencegahan Aksi Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi Pencegahan Aksi Perundungan	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan aksi perundungan yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi Pencegahan Aksi Perundungan	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan aksi perundungan yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi Pencegahan Aksi Perundungan	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan aksi perundungan yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	Dinas Dikpora DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi penguatan peran TPPKS	Jumlah kegiatan Sosialisasi penguatan peran yang dilaksanakan	-	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi penguatan peran TPPKS	Jumlah kegiatan Sosialisasi penguatan peran yang dilaksanakan	-	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi penguatan peran TPPKS	Jumlah kegiatan Sosialisasi penguatan peran yang dilaksanakan	-	1	Kegiatan	Dinas Dikpora DIY	-
1.A.6	Terlaksananya Peningkatan pendidikan ketrampilan/ sekolah vokasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pendampingan Penerapan Kurikulum yang relevan dan adaptif dengan Dudika	Jumlah kegiatan pendampingan penerapan kurikulum yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	Dinas Dikpora DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan bagi Pencari Kerja	Tujuan dari Sub Kegiatan ini yaitu membimbing pencari kerja khususnya siswa siswi SMK dalam menemukan potensi diri yang diarahkan pada persyaratan jabatan di pasar kerja. Aktivitas yang dilakukan adalah kegiatan Assessment dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan kepada siswa/siswi SMK	Jumlah pencari kerja/siswa siswi SMK yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150	150	Orang	Disnakertrans DIY	Program ini tidak secara khusus menyasar pada siswa perempuan, tetapi dengan adanya penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa-siswi SMK diharapkan akan semakin meningkatkan kesiapan dan kesesuaian jurusan dengan dunia usaha dunia industri termasuk juga para siswi. Pada tahun 2025 target Sub Kegiatan ini mengalami kebijakan efisiensi sehingga target serta realisasi menjadi 90 orang siswa SMK.
1.A.7	Terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan gemar Membaca Tingkat Daeran Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bimbingan Teknis Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	5	5	Perpustakaan	DPAD DIY	-
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi	Layanan Ghratama Pustaka Layanan Rumah Belajar Modern Layanan Jogja Library Center Layanan Paket Buku Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Pojok Baca	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6	6	Layanan	Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY	-
1.A.8	Terlaksananya kualitas layanan kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Layanan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (DPA SIPD)	2	2	Laporan	DPAD DIY	-
					Wisata Arsip						

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
1.B	Akses Layanan Kesehatan										
1.B.1	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan responsif gender	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Supervisi perizinan rumah sakit dan fasyankes lainnya, Supervisi Manajemen mutu Fasyankes, Bimtek Manajemen mutu fasyankes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	350	405	Unit	Dinas Kesehatan	-
1.B.2	Terlaksananya promosi hidup sehat yang responsif gender dalam berbagai media edukasi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Bimtek Pelayanan Kesehatan Dasar, , Monev Pelayanan Kesehatan dasar	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	814400	814450	Keluarga	Dinas Kesehatan	-
1.B.3	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang responsif gender	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1475	1536	Orang	Dinas Kesehatan	-
1.B.4	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	Jumlah dokumen hasil advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	5	5	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
1.B.5	Terselenggaranya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pencegahan: Kombinasi pencegahan dengan ABCD (Abstinesia, Be Faithful, Condom, dan Drugs)	Persentase orang yang mendapat pencegahan dengan ABCD	0.18%	0.18%	persentase	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan skrining Kanker serviks dan Payudara setiap 3 tahun sekali pada perempuan usia 30-69 tahun	Pesentase perempuan usia 30-69 tahun yang memperoleh skrining Kanker serviks dan payudara setiap 3 tahun sekali	75%	75%	persentase	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rencana aksi /kegiatan dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi dilakukan secara bersama, tidak bisa dipisahkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penguatan tatakelola melalui : 1. Audit Maternal Perinatal 2. Evaluasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) 3. Audit lintas batas 4. Penyediaan buku pedoman (pedoman AMPSR, ICD PM, ICD MM, Buku KIA, Buku KIA Bayi Kecil) 5. Desiminasi AMPSR	Angka kematian ibu (per seratus ribu kelahiran hidup)	29	28	per seratus ribu kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Penyelarasan: Indikator program pembangunan daerah program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
					Penguatan kualitas layanan : 1. Koordinasi dan evaluasi KIA 2. Evaluasi dan koordinasi penurunan AKI/AKB/ dan stunting 3. Supervisi dan akreditasi fasilitas kesehatan 4. Pelatihan petugas 5. Pelayanan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) 6. Penguatan PONEK dan PONEK	Angka kematian bayi (per seribu kelahiran hidup)	8,64	8,57	(per seribu kelahiran hidup)		Penyelarasan: Indikator program pembangunan daerah program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
					Peningkatan akses layanan : 1. Pemeriksaan kehamilan dengan standar 12 T termasuk USG pada trimester 1 dan 3 dan skrining kesehatan jiwa dan minimal 6 kali selama kehamilan 2. Pergub manual rujukan 3. Skrining layak hamil pada catin dan pasangan usia subur	Persentase balita stunting	11.8	10.7	Persen	Dinas Kesehatan	-
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan ini	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9	9	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	5	5	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	3	3	Dokumen	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8	8	Dokumen	Dinas Kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Pelaksanaan KKS - Pembinaan TPP - SKAMRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	3	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8	8	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	8	8	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans penyakit infeksi emerging	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	2	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
1.B.6	Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman untuk semua kelompok tanpa perbedaan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Bimtek untuk pemenuhan standar sarana Distributor Obat, Distributor Alkes, Pedagang Besar Kosmetik dan Pendang Besar Obat Bahan Alam	Jumlah sarana yang dilakukan pembinaan dan telah memenuhi standar teknis yang di tetapkan sesuai peraturan yang berlaku untuk masing-masing sarana	46	48	Sarana	Dinas Kesehatan	-
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	Penyediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	892	491	Unit	Dinas Kesehatan	-
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah paket pengadaan obat, alkes dan vaksin program serta bufferstock di provinsi	5	5	Paket	Dinas Kesehatan	-
1.B.7	Tersusunnya materi tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, gizi	Program pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan dan upaya kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	6	Dokumen	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
	seimbang, pola hidup bersih dan sehat melalui internalisasi kurikulum	masyarakat	Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-Penyediaan dan pengelolaan bufferstock: obat BMHP dan alkes -peningkatan kapasitas teknis dan manajemen krisis kesehatan utk klaster kesehatan, kab/kota, fasyankes melalui bimtek, pelatihan, simulasi, gladi -Koordinasi klaster kesehatan dan stakeholder; tenaga cadangan kesehatan dan emergency Medical Team/EMT -Penyusunan pedoman, SOP, juknis, rencana kontingensi -Pembentukan tim penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200	1200	orang	Dinas Kesehatan	-
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Penyediaan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi SPGDT - Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, obat utk SPGDT - Peningkatan kapasitas team SPGDT - Koordinasi SPGDT	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6	6	unit	Dinas Kesehatan	-
2	PENGUATAN KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN, SERTA PENINGKATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN										
2.A	Terselenggaranya penguatan kapasitas politik, hukum, sosial serta pengambilan	-	-	-	Menguatkan koordinasi kelembagaan kelompok/organisasi masyarakat	Jumlah perempuan yang difasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas perempuan	60	60	Orang	Bakesbangpol	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
	keputusan dalam pembangunan melalui pelatihan dan metode lainnya untuk perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelatihan peningkatan kapasitas pada organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas perempuan	3	3	lembaga	DP3AP2 DIY	-
2.B	Terdiseminasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta berbagai kebijakan yang berhubungan dengan perempuan serta kelompok rentan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	Pendidikan Politik Untuk Pemilih Perempuan	Jumlah orang peserta Pendidikan Politik Untuk Pemilih Perempuan	500	500	orang	Bakesbangpol	-
					Menguatkan kepemimpinan perempuan dengan menjangkau lintas wilayah Pendidikan Politik Untuk Pemilih Perempuan	Jumlah orang peserta penguatan kepemimpinan perempuan lintas wilayah	500	500			-
2.C	Meningkatnya literasi, pemahaman dan pengetahuan perempuan untuk mengurangi digital divide	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan kualitas layanan informasi publik di OPD Pemda DIY	Jumlah OPD dengan predikat informatif	40%	41%	persen	Diskominfo	-
2.D	Terbentuknya karakter perempuan yang memiliki kepercayaan diri dalam mendorong keterlibatan pada berbagai proses pengambilan kebijakan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Pelatihan kepemimpinan perempuan	Jumlah pelatihan kepemimpinan perempuan	1	1	kali kegiatan	DP3AP2	-
3	PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DI EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN										
3.A	Perempuan di Bidang Ekonomi										

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
3.A.1	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan masyarakat, terutama kaum perempuan dan penyandang disabilitas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendaftaran, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usahayang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kemampuan berwirausaha bagi kaum perempuan	Jumlah orang peserta peningkatan kemampuan berwirausaha bagi kaum perempuan	15	20	orang	Diskop UKM	-
		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan yang terbentuk	Jumlah kelompok pemberdayaan perempuan yang terbentuk	5	5	kelompok	DP3AP2	-
3.A.2	Tersedianya kebijakan, layanan dan fasilitasi pengembangan usaha yang responsif terhadap perempuan dan disabilitas	Program pengembangan umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi pelaku UMKM	Sosialisasi Literasi Hukum bagi UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	350	350	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Program penyelenggara keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Pengembangan industri kreatif	Pelebngaan industri kreatif	Jumlah industri kreatif yang dilembagakan	1470	1500	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
			Adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Pengembangan industri kreatif	Peningkatan status desa preneur	Jumlah desa preneur yang meningkat statusnya	16	16	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Kegiatan berupa Pembekalan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Penyandang Disabilitas serta pemberian bantuan hibah peralatan usaha bagi Tenaga Kerja Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	10	10	orang	Disnakertrans DIY	Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 mengalami kebijakan efisiensi sehingga tidak dilaksanakan, di tahun 2025 dilaksanakan tetapi hanya untuk 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang sehingga total dilaksanakan untuk 10 orang.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
3.A.3	Meningkatnya daya saing usaha mikro kecil yang banyak dilakukan perempuan	Program pengembangan umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pengembangan UKM (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing	110	113	Unit Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
					Penyediaan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi bagi UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	750	780	Unit Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Pengembangan industri kreatif	Pelatihan insdustri kreatif	Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)	145	150	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	Pembinaan potensi budaya IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	6500	31544	IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
			Pengembangan Industri Kreatif	-	Pengembangan industri kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	6500	31544	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
3.A.4	Terfasilitasinya akses digital dan fasilitasi pemasaran untuk peningkatan penjualan usaha perempuan	Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	Pembinaan pelaku usaha perdagangan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	470	517	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	-	Fasilitasi pameran dagang internasional/nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	127	139	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	Fasilitasi misi dagang produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	8	8	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	–	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	335	370	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	–
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	–	fasilitasi pemasaran P3DN UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	60	65	UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	–
			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	–	Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi terkait pemasaran Produk UMKM	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	400	450	UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	–
3.A.4	Terlaksananya kegiatan fasilitasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui implementasi program peningkatan literasi keuangan bagi kelompok usaha perempuan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Fasilitasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui implementasi program peningkatan literasi keuangan bagi kelompok usaha perempuan	Jumlah kegiatan fasilitasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui implementasi program peningkatan literasi keuangan bagi kelompok usaha perempuan	5	5	Kegiatan	Biro Perekonomian dan SDA	BPD DIY, OJK DIY, BI Kpw. Yogyakarta, Akademisi, TPAKD Kabupaten/Kota
3.A.5	Terlaksananya penetapan Desa Mandiri Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Penetapan Desa Mandiri Budaya	Jumlah Desa yang ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya	40	45	Desa/Kalurahan	Biro Perekonomian dan SDA	Dinas Kebudayaan DIY Dinas Pariwisata DIY Dinas P3AP2 DIY Dinas Koperasi dan UKM DIY Dinas PMKKPS DIY Biro Tata Pemerintahan DIY BAPPERIDA DIY Paniradya Kaistimewaan DIY DPD LPM DIY
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataran	–	Pengembangan objek Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah objek Wana Wisata Budaya Mataram yang dikembangkan	2	2	Objek	DLHK	–

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	Penyusunan Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Pelaksanaan Pengembangan Lumbung Mataraman sesuai dengan jumlah aktivitas/output/laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	11	11	Laporan	DPKP	-
3.A.6	Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha koperasi dan UMKM	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	150	60	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150	60	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (umkm)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	-	Peningkatan kapasitas usaha, SDM, dan produk	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	110	122	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengembangan UMKM tangguh dan mandiri	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1055	1160	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM dan kewirausahaan	Pelatihan UKM dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	60	60	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
3.A.7	Terselenggaranya peningkatan kapasitas bagi pengembangan ekonomi perempuan	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Pembinaan KEP Desa PRIMA	Jumlah perempuan yang dikembangkan perekonomiannya	250	250	Orang	DP3AP2	
3.A.8	Tersedianya skema bantuan bagi perempuan miskin, perempuan kepala keluarga dan perempuan dengan kerentanan lainnya	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Hibah penguatan modal usaha bagi KEP Desa PRIMA	Jumlah kelompok pemberdayaan perempuan yang diberikan hibah penguatan modal usaha	5	5	Kelompok	DP3AP2	
3.B	Perempuan di Bidang Tenaga Kerja										
3.B.1	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas dan keahlian kerja pada perempuan dan kelompok rentan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kegiatan yang dilakukan yaitu Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dengan berbagai macam Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	500	500	Orang	Disnakertrans DIY	Tidak secara khusus menyasar kaum perempuan tetapi sebagian jenis pelatihan merupakan kompetensi yang seringkali banyak diikuti oleh kaum perempuan misalnya bidang kuliner, makeup artist, menjahit dan lain-lain, meskipun pelatihan tetap dibuka untuk umum dan diikuti juga oleh peserta laki-laki sebagai kesetaraan gender.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Aktivitas yang dilakukan yaitu pembinaan dalam rangka evaluasi bimtek akreditasi di LPK-LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	8	8	LPK	Disnakertrans DIY	Dukungan LPK yang kredibel diperlukan untuk meningkatkan dan menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten serta siap memasuki dunia kerja yang berdaya saing baik laki-laki maupun perempuan secara merata, dan Bimtek Akreditasi LPK mendukung pelaksanaan Akreditasi LPK untuk mencapai tujuan tersebut.
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Aktivitas yang dilakukan antara lain: - Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja - Implementasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja - Internalisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja - Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja - Sosialisasi Pembangunan Karakter bagi Angkatan Kerja - Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Wilayah Selatan - Pelayanan Ketenagakerjaan di Tingkat Kalurahan (Peladi Makarti)	Jumlah dokumen terkait pembangunan ketahanan sosial budaya	7	7	Dokumen	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata melibatkan kepesertaan perempuan dan kelompok rentan	Jumlah Tenaga Kerja (termasuk perempuan dan kelompok rentan) Bidang Pariwisata terertifikasi kompetensi.	90	90	orang	Dinas Pariwisata DIY	–
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif melibatkan kepesertaan perempuan dan kelompok rentan	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	75	75	orang	Dinas Pariwisata DIY	–
		Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan urusan kebudayaan masyarakat di bidang kehutanan	Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	–	Penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	20	25	Kelompok	DLHK	–
			Program penyuluhan pertanian	Pengembangan ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Kerja Sama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan sawasta	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	n/a	30	Orang	DPKP	–
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah Kelompokpetani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	29	29	Kelompok	DPKP	–
				Pengembangan kapasitas kelembagan ekonomi petani berbasis kawasan	Pendampingan Manajenen Koorporasi petani	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang meningkat kapasitasnya	1	1	Laporan	DPKP	–

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
3.B.2	Tersedianya informasi dan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada perempuan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	Aktivitas yang dilakukan antara lain: -monitoring kinerja Unit Layanan Disabilitas -Terlaksananya pembayaran honorarium anggota Tim Unit Layanan Disabilitas setiap bulan -Identifikasi dan pendampingan penempatan tenaga kerja disabilitas baik ke sektor formal maupun informal. -melaksanakan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah yang siap diberangkatkan bekerja.	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	25	25	orang	Disnakertrans DIY	Meningkatkan wawasan dan kesiapan kerja bagi para tenaga kerja mengenai aturan ketenagakerjaan, etos kerja, maupun kondisi dan budaya di daerah penempatan, sehingga diharapkan khususnya pencari kerja wanita akan memberikan kinerja yang lebih baik dan lebih memungkinkan untuk mendapatkan ikatan kerja berkelanjutan yang berarti menjaga angka pengangguran tetap rendah.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Aktivitas yang dilakukan antara lain: - Tersosialisasikannya berbagai aturan regulasi terkait penempatan tenaga kerja, khususnya yang berkaitan dengan bursa kerja sebagai tempat pelayanan penempatan tenaga kerja. - Terselenggaranya pelayanan penempatan oleh BKK sesuai dengan peraturan perundangan. - Meningkatkan dan memperkuat peran BKK dalam upaya penempatan, pendataan dan pemetaan lulusan SMK - Terpecahkannya permasalahan-permasalahan penempatan tenaga kerja dalam negeri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	100	100	orang	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (IPK)	Aktivitas yang dilakukan: Terselenggaranya Koordinasi Awal pelaksanaan kegiatan Pelayanan IPK Online -Terlaksananya Pembuatan SK Pelaksanaan Kegiatan -Terlaksananya Kegiatan Laporan IPK Online dan Forkom Penempatan TK DIY. -Terlaksananya sinkronisasi data informasi pasar kerja online -Terlaksananya pembayaran honorarium bulanan bagi Petugas IPK	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	1	dokumen	Disnakertrans DIY	-
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya sinkronisasi data informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	270	270	orang	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Job Fair/Bursa Kerja	Aktivitas yang dilaksanakan antara lain: - Koordinasi dengan Perusahaan dan Univeritas dan SMK - Terlaksananya koordinasi terkait tempat pelaksanaan job fair - Terlaksananya penyebaran informasi terkait rencana pelaksanaan job fair ke SMK (bersamaan dengan perjalanan pemantauan lembaga penempatan) - Terlaksananya Koordinasi dan Job Canvassing Job Fair ke perusahaan-perusahaan - Terlaksananya kegiatan Job Fair Akbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	75	75	orang	Disnakertrans DIY	-
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Aktivitas yang dilakukan antara lain yaitu: - pelaksanaan Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan - pelaksanaan Padat Karya Pengembangan Potensi Desa : Masyarakat penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY.	Jumlah laporan revitalisasi budaya gotong royong untuk pemberdayaan perempuan	2	2	Laporan	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Aktivitas yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi berupa Forum Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dan Sinergitas Program Transmigrasi, yang akan dipublikasikan melalui Surat Kabar.	Jumlah naskah kesepakatan bersama dengan daerah tujuan dan naskah perjanjian kerja sama dengan daerah tujuan	2	2	Laporan	Disnakertrans DIY	-
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Aktivitas yang dilakukan antara lain: Pelatihan Calon Transmigran serta Penyiapan Peserta Catrans untuk mengikuti Komcad/Latsarmil.	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	25	25	Kepala Keluarga	Disnakertrans DIY	-
3.B.3	Terfasilitasinya upaya Perlindungan Perempuan ditempatkan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Terselenggaranya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundangan - Membahas isu yang berkembang terkait PMI guna meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh penempatan PMI Unprosedural	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240	240	orang	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
		Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perusahaan apakah sudah menerapkan sarana hubungan industrial dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya atau belum. Jika belum maka dilakukan pembinaan untuk perbaikan dalam dunia industri. Pembinaan ini dilaksanakan oleh tim dengan memperhatikan pengarusutamaan gender, di mana terdapat anggota tim baik laki-laki dan juga perempuan.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120	120	perkara	Disnakertrans DIY	-
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat umum dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tempat kerja, dengan tim mediator terdiri dari anggota laki-laki maupun perempuan.	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20	20	perkara	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pelaksanaan Operasional Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya mengatur tentang lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh yang berfungsi untuk membahas berbagai masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan bertujuan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Lembaga ini bertugas memberikan rekomendasi ketenagakerjaan kepada Kepala Daerah atau Gubernur. Dengan adanya lembaga ini diharapkan posisi pekerja yang rentan, baik pekerja laki-laki maupun perempuan tetap terpenuhi hak-haknya.	Jumlah Lembaga Kerja Sama Tripartit	1	1	Lembaga	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Untuk membentuk kebiasaan yang baik dalam hubungan kerja dan akan meningkatkan kualitas hubungan industrial yang lebih harmonis, mencegah terjadinya perselisihan seperti mogok kerja dan demo buruh dikarenakan alasan sistem pengupahan di perusahaan yang dinilai kurang adil serta meningkatkan layanan ketenagakerjaan.	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	80	80	perusahaan	Disnakertrans DIY	Masih adanya perusahaan yang memberikan upah kepada pekerja dengan berpegang teguh pada besaran nominal Upah Minimum baik itu Upah Minimum Provinsi (UMP) ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tanpa melihat masa kerja pekerja tersebut di Perusahaan. Ada juga kemungkinan jabatan yang sama tetapi upah yang diberikan berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan adanya pembinaan.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Aktivitas yang dilakukan antara lain: - Memfasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku -Melakukan pemantauan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di perusahaan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi hak para tenaga kerja yang memang seharusnya diperoleh dan sebagai wujud tindakan preventif edukatif untuk mencegah potensi-potensi perselisihan hubungan industrial	SK Upah Minimum Provinsi (UMP) dan SK Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS)	2	2	SK	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Aktivitas yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ke Kalurahan-kalurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	500	500	orang	Disnakertrans DIY	-
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Memberikan pemahaman bagi perusahaanperusahaan terhadap norma K3 dan norma kerja, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan produktivitas	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan, Norma Kerja dan Norma K3 di Perusahaan	654	654	perusahaan	Disnakertrans DIY	-
3.B.4	Tersedianya pengembangan kompetensi ASN yang responsif gender (kebijakan mutasi dan pengembangan karir perempuan)	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	100	persen	BKD	-
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan Jumlah jabatan formasi disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	2	dokumen	BKD	-
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Seleksi CPNS dan PPPK termasuk di dalamnya formasi disabilitas	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	2	dokumen	BKD	-
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Fasilitasi pengusulan SK Pensiun di BKN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	529	500	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Update Data ASN Disabilitas Pemda DIY Monev Data ASN Disabilitas Pemda DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7	7	dokumen	BKD	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan data kepegawaian ASN disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	7	7	dokumen	BKD	-
			Mutasi dan Promosi ASN	-	-	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100	100	persen	BKD	-
				Pengelolaan Mutasi ASN	Penggunaan sistem merit dalam kegiatan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	200	220	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Fasilitasi pengusulan kenaikan pangkat ASN Disabilitas	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	2	laporan	BKD	-
				Pengelolaan Promosi ASN	Penggunaan sistem merit dalam kegiatan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	dokumen	BKD	-
			Pengembangan Kompetensi ASN	-	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100	100	persen	BKD	-
				Pengelolaan Assessment Center	Pengukuran kompetensi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6	6	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Ujian Dinas bagi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Beasiswa S1, S2, dan S3 bagi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	1	dokumen	BKD	-
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Peningkatan kompetensi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	1	dokumen	BKD	-
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Fasilitasi ujikom ASN Disabilitas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	30	30	orang	BKD	-
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pengangkatan dan Perpindahan Jabatan Fungsional bagi ASN Disabilitas	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	115	115	orang	BKD	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	100	persen	BKD	-
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemberian tambahan penghasilan pegawai disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	4	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PORNAS KORPRI dan Uji kesehatan pegawai disabilitas	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20	20	orang	BKD	-
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Fasilitasi pengusulan Satya lencana Karya Satya bagi ASN Disabilitas	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	480	480	orang	BKD	-
				Pembinaan Disiplin ASN	Sosialisasi disiplin pegawai, dan fasilitasi izin perceraian, cuti bagi ASN Disabilitas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	250	250	orang	BKD	-
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rapat penyelesaian pelanggaran disiplin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	laporan	BKD	-
4	PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN										
4.A	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan										
	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025-2028 sehingga Program Kegiatan Penanganan Kekeran Terhadap Perempuan secara lebih terperinci dapat di dalam RAD tersebut										
4.A.1	Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pertemuan di masyarakat, dan	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Para Pihak dalam Pencegahan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan	10	10	Kali Sosialisasi	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
	kegiatan komunitas di masyarakat	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi	Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (untuk sosialisasi, GEDSI bagi forum/komunitas di DIY)	Jumlah Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1	1	Kali Kegiatan	DP3AP2 DIY, Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY	-
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Advokasi dan Pendampingan PUG dan GEDSI bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung	Jumlah OPD yang mendapat advokasi dan pendampingan PUG	38	38	OPD	DP3AP2, Lembaga Terkait : BAPPERIDA, BPKA, INSPEKTORAT	-
		Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Pelatihan Masyarakat tanggap bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2	2	Kali Sosialisasi	BPBD DIY	-
4.A.2	Terintegrasikannya pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan ke dalam Aktifitas di satuan pendidikan Kewenangan Provinsi	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Bagi Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Lembaga Pendidikan (TIM PKK Satuan Pendidikan, Satgas PPK DIY)	Jumlah sosialisasi pencegahan dan penanganan ksanakan	5	5	Kali Sosialisasi	DP3AP2 DIY, Lembaga Terkait: Dikspora DIY, SMA, SMK	-
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	Implementasi pendidikan karakter melalui bahan ajar Pendidikan Khas Kejojgaan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus	Jumlah Laporan Kegiatan Pendidikan Khas Kejojgaan	1	1	Laporan	Dinas Dikpora DIY	-
4.A.3	Terjalinnya kerjasama antar lembaga (termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal) dalam pencegahan dan pennaganan kekerasan.	Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO secara berjejaring	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3	3	Kali Pertemuan	DP3AP2	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
4.A.4	Tersedianya data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Penyelenggaraan sistem pencatatan dan pelaporan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak DIY	Jumlah Sistem Data yang dikelola	1	1	Sistem	DP3AP2	-
4.B	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025-2028 sehingga Program Kegiatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih terperinci dapat di dalam RAD tersebut										
4.B. 1	Terpenuhinya layanan awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan assemen, intervensi krisis	Jumlah korban yang mendapatkan assemen, intervensi krisis	185	185	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-
4.B.2	Terpenuhinya layanan Penjangkauan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan penjangkauam bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari wilayahnya ke tempat yang aman	Jumlah korban mendapatkan penjangkauam bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari wilayahnya ke tempat yang aman	10	10	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-
4.B.3	Terpenuhinya layanan pengelolaan kasus bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan pengelolaan kasus baik secara inter maupun ektern	Jumlah korban mendapatkan pengelolaan kasus baik secara inter maupun ektern	185	185	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan pendampingan psikologi, rehabsos, rohani, kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah korban mendapatkan layanan	125	125	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Petugas Layanan berbasis masyarakat (misalnya Satgas PPA, dan FPKK/Satgas Tingkat Kalurahan)	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih	60	60	Orang	DP3AP2 , UPT Balai PPA	-
4.B.4	Tersedianya perlindungan sementara dan jangka panjang bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi darurat dan/atau mengancam jiwa	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter, dan Pengasuhan Sementara	Jumlah korban terfasilitasi	10	12	Korban	BPPA	-
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang (berupa pakaian, alat ibadah, penutup & alas kaki), penyediaan perlengkapan kebersihan individu PPKS,	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	213	213	Korban	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	13	13	Korban	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	213	213	Orang	Dinas Sosial DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	6	6	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	13	13	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan permakanan	Penyediaan bahan makanan dan minuman klien, dukungan penyediaan makan minum klien, dan penyediaan jasa tenaga juru masak	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	213	213	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan permakanan	Penyediaan bahan makanan dan minuman klien, dukungan penyediaan makan minum klien, dan penyediaan jasa tenaga juru masak	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	125	125	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan sandang	Penyediaan Sandang (berupa pakaian, alat ibadah, penutup & alas kaki), penyediaan perlengkapan kebersihan individu PPKS,	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	125	125	Orang	Dinas Sosial DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	125	125	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	125	125	Orang	Dinas Sosial DIY	-
4.B.5	Terpenuhinya layanan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan korban melalui mekanisme rujukan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	5	5	Orang	Dinas Sosial DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1	1	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	12	12	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60	60	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	12	12	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100	100	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Penyediaan Sandang	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100	100	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100	100	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	100	100	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80	80	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80	80	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100	100	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5	5	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	4	4	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	1	1	Dokumen	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5	5	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Pant Sosial (BRSPA)	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2	2	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
4.B.6	Tersedianya layanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kemudahan akses bagi korban agar korban segera tertangani	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Pemenuhan hak dasar terkait dengan kesehatan klien selama berada di dalam balai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	125	125	Korban	Dinas Sosial DIY melalui RPS Camp Assesment	Dirujuk sebagai Klien RPS Camp Assesment
			- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Pemenuhan hak dasar terkait dengan kesehatan klien selama berada di dalam balai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	213	213	Korban	Dinas Sosial DIY melalui RPS Anak	RPS Anak
			- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	213	213	Korban	Dinas Sosial DIY melalui RPS Anak	RPS Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Penyelenggaraan layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Jumlah korban mendapatkan layanan medis dan medikolegal	8	10	Korban	BPPA	-
		Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	Fasilitasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan anak	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan dan Penyangga dan Disabilitas Sesuai Ketentuan	100	100	Persen	Dinas Kesehatan DIY Melalui Bapel Jamkesos DIY	-
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	Peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional lembaga pemberi layanan dalam memberikan layanan kesehatan	Puskemas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak	100	100	persen	Dinas Kesehatan DIY	-
						Prosentase pasien yang dilayani					-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	Penyelenggaraan Layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Jumlah korban mendapatkan layanan medis dan medikolegal	100	100	persen	Dinas Kesehatan DIY, RSJ Grhasia, RS Respira	-
4.C	Tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konseling dan/atau pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Penyelenggaraan layanan Psikologis bagi klien selama berada di dalam balai	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	213	213	Orang	Dinas Sosial DIY melalui RPS Anak	Dirujuk sebagai Klien RPS Anak
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Penyelenggaraan layanan Psikologis bagi klien selama berada di dalam balai	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	125	125	Orang	Dinas Sosial DIY melalui RPS Camp Assesment	Dirujuk sebagai Klien RPS Camp Assesment
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Penyediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor, penyediaan dukungan penyelenggaraan rapat, penyediaan narasumber/instruktur & tenaga ahli, penyediaan jasa penyelenggara acara, dan perjalanan dinas	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi	125	125	Orang	Dinas Sosial DIY melalui RPS Camp Assesment	Dirujuk sebagai Klien RPS Camp Assesment
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Penyelenggaraan Layanan Psikologis Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Korban mendapatkan layanan psikologis	38	40	Orang	BPPA	-
5	INFRASTRUKTUR RESPONSIF GENDER										
5. A	Tersedianya jumlah ruang publik (Terminal Bus, Stasiun KA, Mall, Pasar Tradisional, Perkantoran swasta, Taman/Ruang Terbuka, Lembaga	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe B	Ruang Publik ruang laktasi	Persentase Ruang Laktasi di Ruang Publik	4	5	Jumlah Ruang Publik	Dishub, , Dinas Penanaman Modal	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
	Pendidikan, dll) yang memiliki Ruang Laktasi										
5.B	Tersedianya kawasan pemukiman yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Menyediakan PSU layak di permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	178	178	Lokasi	Dinas PU ESDM	Perhitungan target tidak akumulatif
5.C	Terlayannya warga negara dengan air minum layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pelayanan terhadap warga negara melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.52	96.72	Persen	Dinas PU ESDM	Perhitungan target secara akumulatif
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	0	5	Hektar	Dinas PU ESDM	Perhitungan target tidak akumulatif
		Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pelayanan terhadap Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	28035	28535	Rumah Tangga	Dinas PU ESDM	Perhitungan target secara akumulatif
5.D	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	1	1	Bidang tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-
6	PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN DALAM SITUASI DAERURAT DAN PERUBAHAN IKLIM										

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
6.A	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Program penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca bencana	Tersusunnya Dokumen Pengkajian Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2	2	Dokumen	BPBD	-
6.B	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250	400	Orang	BPBD	-
	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Distribusi peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	205	25	Keluarga	BPBD	-
6.C	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12	12	Laporan	BPBD	-
6.D	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Layanan Kesehatan bagi Penduduk yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	438	438	Orang	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Layanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28415	28500	Orang	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
6.E	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	Penyediaan Permakanan	Perlindungan dan jaminan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban bencana Sosial	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	250	250	Orang	Dinas Sosial	-
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	290	290	Orang	Dinas Sosial	Target Layanan berupa Pemulasaraan dan Pemulangan Orang Terlantar
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	150	150	Orang	Dinas Sosial	-
				Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya pada Masa Tanggap Darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	125	125	Orang	Dinas Sosial	-
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kesiapsiagaan bencana dan perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial	60	60	Orang	Dinas Sosial	-
				Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	55	55	Orang	Dinas Sosial	Target layanan diperuntukan memperkuat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
				Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah di lokasi rawan bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana di lokasi rawan bencana	550	550	Orang	Dinas Sosial	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
				Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana	Penyuluhan sosial kepada masyarakat terkait	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait	2090	2090	Orang	Dinas Sosial	-
				Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	31	31	Dokumen	Dinas Sosial	-
				Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam)	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	36	36	Orang	Dinas Sosial	Target layanan diperuntukan memperkuat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
6.F	Tercapainya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan pencemaran dan/atau Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan pencemaran pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Jumlah Penanggulangan Bencana pada Lokasi Rawan	50	50	Titik	DLHK	-
			Penghentian pencemaran dan/atau Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	Penghentian sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50	50	Titik	DLHK	-
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan dan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga ke masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	Pembinaan kelompok masyarakat	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	190	250	Entitas	DLHK	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	–	Peningkatan Kapasitas dan Kompeten Sinya terkait PPLH	Jumlah lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompeten Sinya terkait PPLH	60	60	Kelompok	DLHK	–
6.G	Tercapainya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	–	Penanggulangan Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran Dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50	50	Titik	DLHK	–
6.H	Terkelolanya sampah secara terpadu dan melibatkan komponen masyarakat	Program pengolahan persampahan	Pemrosesan akhir di TPA/TPST regional	–	Pemrosesan akhir sampah dan residu di TPA/TPST regional	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST regional	600	600	Ton	DLHK	Berdasarkan Surat Gubernur Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 tentang kebijakan penutupan TPA Piyungan secara permanen dan mulai diberlakukannya deentralisasi sampah ke masing-masing kabupaten/kota di wilayah DIY.
			Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional	–	Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	13	13	Unit	DLHK	
			Pemeliharaan sarana TPA/TPST Regional	–	Pemeliharaan sarana dan prasarana TPA/TPST Regional	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	Persen	DLHK	Sub Kegiatan pengganti atasnya krm penutupan TPA dan diberlakukannya desentralisasi sampah
			Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	–	Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional yang diterapkan	Jumlah volume sampah dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional yang diterapkan	600	600	Ton	DLHK	–
			Penyediaan Saranan dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPS T Regional	–	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	3	3	Unit	DLHK	–
6.I	Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang	–	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	13	13	Ruang Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	–

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
	berkualitas	tata ruang	Strategis	–	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	n/a	1	Ruang Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	–
6.J	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggungan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	745	730	Hektar	DPKP	–
6.K	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit	BPBD	–
6.L	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2	2	Dokumen	BPBD	–
6.M	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Teknis dan Manajerial Personil TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	31	31	Orang	BPBD	–
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengadaan Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	5	5	Jenis	BPBD	–
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	1	Dokumen	BPBD	–

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
6.N	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250	100	Orang	BPBD	-
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	12	12	Laporan	BPBD	-
6.O	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2	2	Dokumen	BPBD	-
6.P	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3	3	Dokumen	BPBD	-
7	MEDIA DAN PUBLIKASI RESPONSIF GENDER										
7.A	Terlaksananya publikasi responsif gender	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Publikasi terkait responsif gender di berbagai media	Jumlah publikasi responsif gender	2	2	kali	Diskominfo	-
8	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PUG DI PROSES PEMBANGUNAN										
8.A	Pelebagaan PUG (Kebijakan, Sumberdaya Manusia dan Data Pilah)										
8.A1	Tersusun dan terdiseminasinya kebijakan yang memberikan penguatan hak perempuan dan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Diseminasi regulasi PUG di DIY	Terlaksananya diseminasi regulasi PUG di DIY	1	1	kali kegiatan	DP3AP2	

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
	kelompok rentan untuk mendukung terciptanya keadilan gender melalui peningkatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan regulasi diy	Penyusunan naskah bahan kebijakan dan penyusunan regulasi terkait PUG	Tersusunnya regulasi terkait PUG	1	-	Dokumen	Biro Kesra Setda DIY	Penyusunan bahan rumusan kebijakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Setda DIY
8.A.2	Terpenuhinya SDM yang responsif gender dan memiliki kemampuan melakukan analisa gender pada seluruh proses pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Pelatihan PPRG bagi perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelatihan PPRG	38	38	OPD	DP3AP2	-
8.A.3	Terkelolanya satu data terintegrasi milik Pemerintah Daerah DIY yang menerapkan sistem data terpilah gender untuk mendukung proses pembangunan responsif gender di DIY	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pengelolaan satu data terintegrasi	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	8	8	Dokumen	BAPPERIDA	-
8.B	Penyelenggaraan PUG										
8.B.1	Perencanaan										
8.B.1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah yang responsif gender (RPJPD/RPJMD/RKPD)	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	4	Dokumen	BAPPERIDA	-
8.B.2	Penganggaran										

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
8.B.2.1	Terdokumentasikan jumlah Sub kegiatan yang disertai KAK terintegrasi gender sebagai Gender Action Budget	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	Dokumen	BPKA	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	Dokumen	BPKA	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	Dokumen	BPKA	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	6	Dokumen	BPKA	-
8.B.3	Pelaksanaan										
8.B.3.1	Terlaksananya Pelembagaan PUG melalui Koordinasi Pokja PUG	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PUG DIY	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pokja PUG DIY	1	1	Kegiatan	DP3AP2	-
8.B.4	Pemantauan										
8.B.4.1	Terlaksananya Pemantauan Penyelenggaraan PUG tahunan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Rapat Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan PUG	Terlaksananya pemantauan penyelenggaraan PUG	1	1	Kali kegiatan	DP3AP2	-
8.B.5	Evaluasi										
8.B.5.1	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan PUG tahunan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Rapat Evaluasi PUG dengan OPD driver	Terlaksananya rapat evaluasi PUG tahunan	1	1	Kali kegiatan	DP3AP2	-
8.B.6	Pengawasan										

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2026	2027			
8.B.6.1	Tersusunnya indikator dan borang/lembar isian pengawasan dan rencana pelaksanaan pengawasan	Penyusunan Pedoman/petunjuk teknis PUG dalam Pengawasan(Pemb aruan Keputusan inspektur DIY Nomor 28 /KPTS/2021 Tentang prubahan keputusan Inspektur DIY nomor 31 tahun 2018 tentang pedoman, pengawasan PPRG)	-	-	Tersusunnya dokumen Pedoman/petunjuk teknis PUG dalam Pengawasan PPRG	Jumlah dokumen Pedoman/petunjuk teknis PUG dalam Pengawasan PPRG	1	1	Dokumen	Inspektorat	-
8.B.6.2	Terlaksananya pengawasan PUG pada prangkat Daerah DIY	Rekomendasi APIP/Inspektorat terkait PUG dalam Perencanaan (Integrasi Isu Gender dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD)	-	-	Tersusunnya rekomendasi APIP/Inspektorat terkait PUG dalam Perencanaan	Jumlah Dokumen rekomendasi APIP/Inspektorat terkait PUG dalam Perencanaan	1	1	Dokumen	Inspektorat	-
8.B.7	Pelaporan										
8.B.7.1	Tersusunnya Substansi gender dalam dokumen pelaporan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintah	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Tersusunnya substansi gender dalam dokumen LKJIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJiP Perangkat daerah yang memasukkan substansi gender	38	38	Dokumen	Biro Organisasi	-
		-	-	-	Tersusunnya substansi gender dalam dokumen LKPJ DIY	Jumlah Dokumen LKPJ Pemda DIY yang memuat substansi gender	1	1	Dokumen	Biro Tata pemerintahan	-
		-	-	-	Tersusunnya substansi gender dalam dokumen LPPD DIY	Jumlah Dokumen LKPPD Pemda DIY yang memuat substansi gender	1	1	Dokumen	Biro Tata pemerintahan	-

B. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2028-2032

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
1	PENINGKATAN AKSES LAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN													
1.A	Pendidikan Perempuan													
1.A.1	Terlaksananya Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru	118	118	118	118	118	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pemberian BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bagi SMA Negeri	Jumlah satuan pendidikan penerima BOSDA	69	69	69	69	69	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pemberian BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bagi SMK Negeri	Jumlah satuan pendidikan penerima BOSDA	49	49	49	49	49	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pemberian BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bagi SLB Negeri	Jumlah satuan pendidikan penerima BOSDA	9	9	9	9	9	satuan pendidikan	Dinas Dikpora DIY	-
1.A.2	Terlaksananya Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang responsif gender	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	100	100	100	100	100	Orang	Balai Tekkomdik Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	100	100	100	100	100	Orang	Balai Tekkomdik Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kegiatan MLS (Mobile Learning Service)	100	100	100	100	100	Orang	Balai Tekkomdik Dinas Dikpora DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)	Bimbingan Teknis Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)	90	90	90	90	90	Orang	Dinas Dikpora DIY	-
1.A.3	Beasiswa bagi anak miskin atau disabilitas atau kerentanan lainnya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	Pemberian bantuan Beasiswa Retrieval	Jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan Beasiswa Retrieval	200	200	200	200	200	peserta didik	Dinas Dikpora DIY	-
					Pemberian bantuan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus	4976	4976	4976	4976	4976	peserta didik	Dinas Dikpora DIY	Sasaran: disabilitas (tidak hanya perempuan)
1.A.4	Terlaksananya Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan bagi anak putus sekolah, korban bullying atau korban kekerasan berbasis gender	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	Pemberian bantuan Beasiswa Segera Berpusaka (Selamatkan Generasi Muda Berantas Putus Sekolah SMK)	Jumlah peserta didik yang mendapatkan bantuan Beasiswa Segera Berpusaka	25	25	25	25	25	peserta didik	Dinas Dikpora DIY	Diberikan kepada anak putus sekolah jenjang SMA/SMK untuk melanjutkan kembali ke pendidikan nonformal dengan tambahan pembelajaran ketrampilan kejuruan.
1.A.5	Terlaksananya Pencegahan Aksi Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi Pencegahan Aksi Perundungan	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan aksi perundungan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi Pencegahan Aksi Perundungan	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan aksi perundungan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi Pencegahan Aksi Perundungan	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan aksi perundungan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Kegiatan	Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi penguatan peran TPPKS	Jumlah kegiatan Sosialisasi penguatan peran TPPKS yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi penguatan peran TPPKS	Jumlah kegiatan Sosialisasi penguatan peran TPPKS yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Kegiatan	Baldikmen Kab/Kota Dinas Dikpora DIY	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi penguatan peran TPPKS	Jumlah kegiatan Sosialisasi penguatan peran TPPKS yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Kegiatan	Dinas Dikpora DIY	-
1.A.6	Terlaksananya Peningkatan pendidikan ketrampilan/sekolah vokasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pendampingan Penerapan Kurikulum yang relevan dan adaptif dengan Dudika	Jumlah kegiatan pendampingan penerapan kurikulum yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	Kegiatan	Dinas Dikpora DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
1.A.7		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Tujuan dari Sub Kegiatan ini yaitu membimbing pencari kerja khususnya siswa siswi SMK dalam menemukan potensi diri yang diarahkan pada persyaratan jabatan di pasar kerja. Aktivitas yang dilakukan adalah kegiatan Assessment dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan kepada siswa/siswi SMK	Jumlah pencari kerja/siswa siswi SMK yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150	150	150	150	150	Orang	Disnakertrans DIY	Program ini tidak secara khusus menyasar pada siswa perempuan, tetapi dengan adanya penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa-siswi SMK diharapkan akan semakin meningkatkan kesiapan dan kesesuaian jurusan dengan dunia usaha dunia industri termasuk juga para siswi. Pada tahun 2025 target Sub Kegiatan ini mengalami kebijakan efisiensi sehingga target serta realisasi menjadi 90 orang siswa SMK.
	Terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Program pembinaan perpustakaan	Pembudayaan gemar Membaca Tingkat Daeran Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bimbingan Teknis Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	5	5	5	5	5	Perpustakaan	DPAD DIY	-
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi	Layanan Ghratama Pustaka Layanan Rumah Belajar Modern Layanan Jogja Library Center Layanan Paket Buku Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Pojok Baca	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6	6	6	6	6	Layanan	Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
1.A.8	Terlaksananya kualitas layanan kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Layanan Arsip Wisata Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (DPA SIPD)	2	2	2	2	2	Laporan	DPAD DIY	-
1.B	Akses Layanan Kesehatan													
1.B.1	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan responsif gender	Program pemenuhan upaya kesehatan yang terakreditasi dan upaya kesehatan masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Supervisi perizinan rumah sakit dan fasyankes lainnya, Supervisi Manajemen mutu Fasyankes, Bimtek Manajemen mutu fasyankes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	425	450	470	490	510	Unit	Dinas Kesehatan	-
1.B.2	Terlaksananya promosi hidup sehat yang responsif gender dalam berbagai media edukasi	Program pemenuhan upaya kesehatan yang terakreditasi dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Bimtek Pelayanan Kesehatan Dasar, , Monev Pelayanan Kesehatan dasar	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	8145 00	8150 00	8160 00	8165 00	8170 00	Keluarga	Dinas Kesehatan	-
1.B.3	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang responsif gender	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1000	1000	1000	1000	1000	Orang	Dinas Kesehatan	-
1.B.4	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	Jumlah dokumen hasil advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
1.B.5	Terselenggaranya pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pencegahan: Kombinasi pencegahan dengan ABCD (Abstinencia, Be Faithful, Condom, dan Drugs)	Persentase orang yang mendapat pencegahan dengan ABCD	0.18 %	0.18 %	0.18 %	0.18 %	0.18 %	persentase	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Melakukan skrining Kanker serviks dan Payudara setiap 3 tahun sekali pada perempuan usia 30-69 tahun	Pesentase perempuan usia 30-69 tahun yang memperoleh skrining Kanker serviks dan payudara setiap 3 tahun sekali	75%	75%	75%	75%	75%	persentase	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rencana aksi /kegiatan dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi dilakukan secara bersama, tidak bisa dipisahkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penguatan tatakelola melalui : 1. Audit Maternal Perinatal 2. Evaluasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) 3. Audit lintas batas 4. Penyediaan buku pedoman (pedoman AMPSR, ICD PM, ICD MM, Buku KIA, Buku KIA Bayi Kecil) 5. Desiminasi AMPSR	Jumlah kematian ibu	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Kesehatan	Catatan: tidak ada target kematian bayi di RPJPD, RPJMD, renstra, maupun renja OPD, target angka kematian ibu yang tersedia di RPJPD pada tahun 2045 sebesar 30, namun tidak ada target per tahun

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
					Penguatan kualitas layanan : 1. Koordinasi dan evaluasi KIA 2. Evaluasi dan koordinasi penurunan AKI/AKB/ dan stunting 3. Supervisi dan akreditasi fasilitas kesehatan 4. Pelatihan petugas 5. Pelayanan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) 6. Penguatan PONEK dan PONEK	Jumlah kematian bayi	-	-	-	-	-			
					Peningkatan akses layanan : 1. Pemeriksaan kehamilan dengan standar 12 T termasuk USG pada trimester 1 dan 3 dan skrining kesehatan jiwa dan minimal 6 kali selama kehamilan 2. Pergub manual rujukan 3. Skrining layak hamil pada catin dan pasangan usia subur	Persentase balita stunting	-	-	-	-	-			
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan ini	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Pelaksanaan KKS - Pembinaan TPP - SKAMRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	3	3	3	3	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans penyakit infeksi emerging	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinkes belum bisa menentukan target untuk th 2028-2032. Sehingga untuk target setelah Renstra 2022-2027 menggunakan 1 dokumen untuk mengakomodir subkegiatan in	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Kesehatan	-
1.B.6	Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman untuk semua kelompok tanpa perbedaan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Bimtek untuk pemenuhan standar sarana Distributor Obat, Distributor Alkes, Pedagang Besar Kosmetik dan Pendang Besar Obat Bahan Alam	Jumlah sarana yang dilakukan pembinaan dan telah memenuhi standar teknis yang di tetapkan sesuai peraturan yang berlaku untuk masing-masing sarana	50	52	54	56	58	Sarana	Dinas Kesehatan	-
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	491	250	165	155	53	Unit	Dinas Kesehatan	-
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah paket pengadaan obat, alkes dan vaksin program serta bufferstock di provinsi	5	5	5	5	5	Paket	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
1.B.7	Tersusunnya materi tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, gizi seimbang, pola hidup bersih dan sehat melalui internalisasi kurikulum	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	2	2	2	2	Dokumen	Dinas Kesehatan	–
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Penyediaan dan pengelolaan bufferstock: obat BMHP dan alkes - peningkatan kapasitas teknis dan manajemen krisis kesehatan utk klaster kesehatan, kab/kota, fasyankes melalui bimtek, pelatihan, simulasi, gladi - Koordinasi klaster kesehatan dan stakeholder; tenaga cadangan kesehatan dan emergency Medical Team/EMT - Penyusunan pedoman, SOP, juknis, rencana kontingnesi - Pembentukan tim penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200	1200	1200	1200	1200	orang	Dinas Kesehatan	–
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Penyediaan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi SPGDT - Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, obat utk SPGDT - Peningkatan kapasitas team SPGDT - Koordinasi SPGDT	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6	6	6	6	6	unit	Dinas Kesehatan	–
2	PENGUATAN KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN, SERTA PENINGKATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN													

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
2.A	Terselenggaranya penguatan kapasitas politik, hukum, sosial serta pengambilan keputusan dalam pembangunan melalui pelatihan dan metode lainnya untuk perempuan	-	-	-	Menguatkan koordinasi kelembagaan kelompok/organisasi masyarakat	Jumlah perempuan yang difasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas perempuan	60	60	60	60	60	orang	Bakesbangpol	-
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelatihan peningkatan kapasitas pada organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas perempuan	3	3	3	3	3	lembaga	DP3AP2	-
2.B	Terdiseminaskannya Kebijakan dan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta berbagai kebijakan yang berhubungan dengan perempuan serta kelompok rentan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	Pendidikan Politik Untuk Pemilih Perempuan	Jumlah orang peserta Pendidikan Politik Untuk Pemilih Perempuan	500	500	500	500	500	orang	Bakesbangpol	-
					Menguatkan kepemimpinan perempuan dengan menjangkau lintas wilayah Pendidikan Politik Untuk Pemilih Perempuan	Jumlah orang peserta penguatan kepemimpinan perempuan lintas wilayah	500	500	500	500	500			-
2.C	Meningkatnya literasi, pemahaman dan pengetahuan perempuan untuk mengurangi digital divide	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan kualitas layanan informasi publik di OPD Pemda DIY	Jumlah OPD dengan predikat informatif	42%	43%	44%	45%	45%	persen	Diskominfo	-
2.D	Terbentuknya karakter perempuan yang memiliki kepercayaan diri dalam mendorong keterlibatan pada berbagai proses pengambilan kebijakan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Pelatihan kepemimpinan perempuan	Jumlah pelatihan kepemimpinan perempuan	1	1	1	1	1	kali kegiatan	DP3AP2	-
3	PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DI EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN													
3.A	Perempuan di Bidang Ekonomi													

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
3.A.1	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan masyarakat, terutama kaum perempuan dan penyandang disabilitas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usahayang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kemampuan berwirausaha bagi kaum perempuan	Jumlah orang peserta peningkatan kemampuan berwirausaha bagi kaum perempuan	25	30	35	40	45	orang	Diskop UKM	-
		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Pembentukan kelompok pemberdayaan perempuan	Jumlah kelompok pemberdayaan perempuan yang terbentuk	5	5	5	5	5	kelompok	DP3AP2	-
3.A.2	Tersedianya kebijakan, layanan dan fasilitasi pengembangan usaha yang responsif terhadap perempuan dan disabilitas	Program pengembangan umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi pelaku UMKM	Sosialisasi Literasi Hukum bagi UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	350	350	350	350	350	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Program penyelenggara keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Pengembangan industri kreatif	Pelebngaan industri kreatif	Jumlah industri kreatif yang dilembagakan	1550	1600	1650	1700	1750	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
			Adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Pengembangan industri kreatif	Peningkatan status desa preneur	Jumlah desa preneur yang meningkat statusnya	16	16	16	16	16	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Kegiatan berupa Pembekalan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Penyandang Disabilitas serta pemberian bantuan hibah peralatan usaha bagi Tenaga Kerja Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	10	10	10	10	10	orang	Disnakertrans DIY	Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 mengalami kebijakan efisiensi sehingga tidak dilaksanakan, di tahun 2025 dilaksanakan tetapi hanya untuk 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang sehingga total dilaksanakan untuk 10 orang.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
3.A.3	Meningkatnya daya saing usaha mikro kecil yang banyak dilakukan perempuan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pengembangan UKM (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing	116	119	122	125	128	Unit Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
					Penyediaan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi bagi UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	810	840	870	900	930	Unit Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Pengembangan industri kreatif	Pelatihan insdustri kreatif	Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)	155	160	165	170	175	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
		Program penyelengaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	Pembinaan potensi budaya IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	31544	31544	31544	31544	31544	IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
			Pengembangan Industri Kreatif	-	Pengembangan industri kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	31544	31544	31544	31544	31544	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
3.A.4	Terfasilitasinya akses digital dan fasilitasi pemasaran untuk peningkatan penjualan usaha perempuan	Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	Pembinaan pelaku usaha perdagangan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	517	517	517	517	517	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Pameran Dagang Internasional/Nasional	-	Fasilitasi pameran dagang internasional/nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	139	139	139	139	139	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	Fasilitasi misi dagang produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	8	8	8	8	8	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	-	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	370	370	370	370	370	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	fasilitasi pemasaran P3DN UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	65	65	65	65	65	UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi terkait pemasaran Produk UMKM	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	450	450	450	450	450	UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
3.A.4	Terlaksananya kegiatan fasilitasi kegiatan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui implementasi program peningkatan literasi keuangan bagi kelompok usaha perempuan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Fasilitasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui implementasi program peningkatan literasi keuangan bagi kelompok usaha perempuan	Jumlah kegiatan fasilitasi kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui implementasi program peningkatan literasi keuangan bagi kelompok usaha perempuan	5	5	5	5	5	Kegiatan	Biro Perekonomian dan SDA	BPD DIY, OJK DIY, BI Kpw. Yogyakarta, Akademisi, TPAKD Kabupaten/Kota

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
3.A.5	Terlaksananya penetapan Desa Mandiri Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Penetapan Desa Mandiri Budaya	Jumlah Desa yang ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya	48	51	54	57	60	Desa/Kalurahan	Biro Perekonomian dan SDA	Dinas Kebudayaan DIY Dinas Pariwisata DIY Dinas P3AP2 DIY Dinas Koperasi dan UKM DIY Dinas PMKKPS DIY Biro Tata Pemerintahan DIY BAPPERIDA DIY Paniradya Kaistimewaan DIY DPD LPM DIY
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	–	Pengembangan objek Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah objek Wana Wisata Budaya Mataram yang dikembangkan	2	2	2	2	2	Objek	DLHK	–
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	Penyusunan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Pelaksanaan Pengembangan Lumbung Mataraman sesuai dengan jumlah aktivitas/output/laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	11	11	11	11	11	Laporan	DPKP	–
3.A.6	Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha koperasi dan UMKM	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	60	60	60	60	60	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	–
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	60	60	60	60	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	–

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	-	Peningkatan kapasitas usaha, SDM, dan produk	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	134	146	160	176	192	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengembangan UMKM tangguh dan mandiri	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1275	1400	1540	1700	1860	Unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
				Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM dan kewirausahaan	Pelatihan UKM dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	60	60	60	60	60	Orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-
3.A.7	Terselenggaranya peningkatan kapasitas bagi pengembangan ekonomi perempuan	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Pembinaan KEP Desa PRIMA	Jumlah perempuan yang dikembangkan perekonomiannya	250	250	250	250	250	Orang	DP3AP2	
3.A.8	Tersedianya skema bantuan bagi perempuan miskin, perempuan kepala keluarga dan perempuan dengan kerentanan lainnya	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Hibah penguatan modal usaha bagi KEP Desa PRIMA	Jumlah kelompok pemberdayaan perempuan yang diberikan hibah penguatan modal usaha	5	5	5	5	5	Kelompok	DP3AP2	
3.B	Perempuan di Bidang Tenaga Kerja													

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
3.B.1	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas dan keahlian kerja pada perempuan dan kelompok rentan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kegiatan yang dilakukan yaitu Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dengan berbagai macam Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	500	500	500	500	500	Orang	Disnakertrans DIY	Tidak secara khusus menyasar kaum perempuan tetapi sebagian jenis pelatihan merupakan kompetensi yang seringkali banyak diikuti oleh kaum perempuan misalnya bidang kuliner, makeup artist, menjahit dan lain-lain, meskipun pelatihan tetap dibuka untuk umum dan diikuti juga oleh peserta laki-laki sebagai kesetaraan gender.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Aktivitas yang dilakukan yaitu pembinaan dalam rangka evaluasi bimtek akreditasi di LPK-LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	8	8	8	8	8	LPK	Disnakertrans DIY	Dukungan LPK yang kredibel diperlukan untuk meningkatkan dan menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten serta siap memasuki dunia kerja yang berdaya saing baik laki-laki maupun perempuan secara merata, dan Bimtek Akreditasi LPK mendukung pelaksanaan Akreditasi LPK untuk mencapai tujuan tersebut.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Aktivitas yang dilakukan antara lain: -Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja -Implementasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja -Internalisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja -Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja -Sosialisasi Pembangunan Karakter bagi Angkatan Kerja -Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Wilayah Selatan -Pelayanan Ketenagakerjaan di Tingkat Kalurahan (Peladi Makarti)	Jumlah dokumen terkait pembangunan ketahanan sosial budaya	7	7	7	7	7	Dokumen	Disnakertrans DIY	-
					Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	NA	NA	NA	NA	NA	orang	Dinas Pariwisata DIY	-
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata melibatkan kepesertaan perempuan dan kelompok rentan	Jumlah Tenaga Kerja (termasuk perempuan dan kelompok rentan) Bidang Pariwisata terertifikasi kompetensi.	NA	NA	NA	NA	NA	orang	Dinas Pariwisata DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif melibatkan kepesertaan perempuan dan kelompok rentan	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	NA	NA	NA	NA	NA	orang	Dinas Pariwisata DIY	-
		Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan urusan kebudayaan masyarakat di bidang kehutanan	Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	-	Penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	25	25	25	25	25	Kelompok	DLHK	-
		Program penyuluhan pertanian	Pengembangan ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Kerja Sama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan sawasta	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	30	30	30	30	30	Orang	DPKP	-
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani	Jumlah Kelompokpetani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	29	29	29	29	29	Kelompok	DPKP	-
			Pengembangan kapasitas kelembagan ekonomi petani berbasis kawasan	Pendampingan Manajenen Koorporasi petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang meningkat kapasitasnya	1	1	1	1	1	Laporan	DPKP	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
3.B.2	Tersedianya informasi dan fasilitasi penempatan tenaga kerja pada perempuan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	Aktivitas yang dilakukan antara lain: - monitoring kinerja Unit Layanan Disabilitas - Terlaksananya pembayaran honorarium anggota Tim Unit Layanan Disabilitas setiap bulan - Identifikasi dan pendampingan penempatan tenaga kerja disabilitas baik ke sektor formal maupun informal. - melaksanakan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah yang siap diberangkatkan bekerja.	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	25	25	25	25	25	orang	Disnakertrans DIY	Meningkatkan wawasan dan kesiapan kerja bagi para tenaga kerja mengenai aturan ketenagakerjaan, etos kerja, maupun kondisi dan budaya di daerah penempatan, sehingga diharapkan khususnya pencari kerja wanita akan memberikan kinerja yang lebih baik dan lebih memungkinkannya untuk mendapatkan ikatan kerja berkelanjutan yang berarti menjaga angka pengangguran tetap rendah.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Aktivitas yang dilakukan antara lain: - Tersosialisasikannya berbagai aturan regulasi terkait penempatan tenaga kerja, khususnya yang berkaitan dengan bursa kerja sebagai tempat pelayanan penempatan tenaga kerja. - Terselenggaranya pelayanan penempatan oleh BKK sesuai dengan peraturan perundangan. - Meningkatkan dan memperkuat peran BKK dalam upaya penempatan, pendataan dan pemetaan lulusan SMK - Terpecahkannya permasalahan-permasalahan penempatan tenaga kerja dalam negeri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	100	100	100	100	100	orang	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja (IPK) Online	Aktivitas yang dilakukan: Terselenggaranya Koordinasi Awal pelaksanaan kegiatan Pelayanan IPK Online -Terlaksananya Pembuatan SK Pelaksanaan Kegiatan -Terlaksananya Kegiatan Laporan IPK Online dan Forkom Penempatan TK DIY. -Terlaksananya sinkronisasi data informasi pasar kerja online -Terlaksananya pembayaran honorarium bulanan bagi Petugas IPK	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	1	1	1	1	dokumen	Disnakertrans DIY	-
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya sinkronisasi data informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	270	270	270	270	270	orang	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Job Fair/Bursa Kerja	Aktivitas yang dilaksanakan antara lain: -Koordinasi dengan Perusahaan dan Universitas dan SMK -Terlaksananya koordinasi terkait tempat pelaksanaan job fair -Terlaksananya penyebaran informasi terkait rencana pelaksanaan job fair ke SMK (bersamaan dengan perjalanan pemantauan lembaga penempatan) -Terlaksananya Koordinasi dan Job Canvassing Job Fair ke perusahaan-perusahaan -Terlaksananya kegiatan Job Fair Akbar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	75	75	75	75	75	orang	Disnakertrans DIY	-
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Aktivitas yang dilakukan antara lain yaitu: - pelaksanaan Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan - pelaksanaan Padat Karya Pengembangan Potensi Desa : Masyarakat penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY.	Jumlah laporan revitalisasi budaya gotong royong untuk pemberdayaan perempuan	2	2	2	2	2	Laporan	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Aktivitas yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi berupa Forum Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dan Sinergitas Program Transmigrasi, yang akan dipublikasikan melalui Surat Kabar.	Jumlah naskah kesepakatan bersama dengan daerah tujuan dan naskah perjanjian kerja sama dengan daerah tujuan	2	2	2	2	2	Laporan	Disnakertrans DIY	-
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Aktivitas yang dilakukan antara lain: Pelatihan Calon Transmigran serta Penyiapan Peserta Catrans untuk mengikuti Komcad/Latsarmil.	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	25	25	25	25	25	Kepala Keluarga	Disnakertrans DIY	-
3.B.3	Perlindungan Perempuan ditempat kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Terselenggaranya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundangan - Membahas isu yang berkembang terkait PMI guna meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh penempatan PMI Unprosedral	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240	240	240	240	240	orang	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perusahaan apakah sudah menerapkan sarana hubungan industrial dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya atau belum. Jika belum maka dilakukan pembinaan untuk perbaikan dalam dunia industri. Pembinaan ini dilaksanakan oleh tim dengan memperhatikan pengarusutamaan gender, di mana terdapat anggota tim baik laki-laki dan juga perempuan.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120	120	120	120	120	perkara	Disnakertrans DIY	-
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat umum dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tempat kerja, dengan tim mediator terdiri dari anggota laki-laki maupun perempuan.	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	20	20	20	20	20	perkara	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya mengatur tentang lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh yang berfungsi untuk membahas berbagai masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan bertujuan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Lembaga ini bertugas memberikan rekomendasi ketenagakerjaan kepada Kepala Daerah atau Gubernur. Dengan adanya lembaga ini diharapkan posisi pekerja yang rentan, baik pekerja laki-laki maupun perempuan tetap terpenuhi hak-haknya.	Jumlah Lembaga Kerja Sama Tripartit	1	1	1	1	1	Lembaga	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Untuk membentuk kebiasaan yang baik dalam hubungan kerja dan akan meningkatkan kualitas hubungan industrial yang lebih harmonis, mencegah terjadinya perselisihan seperti mogok kerja dan demo buruh dikarenakan alasan sistem pengupahan di perusahaan yang dinilai kurang adil serta meningkatkan layanan ketenagakerjaan.	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	80	80	80	80	80	perusahaan	Disnakertrans DIY	Masih adanya perusahaan yang memberikan upah kepada pekerja dengan berpegang teguh pada besaran nominal Upah Minimum baik itu Upah Minimum Provinsi (UMP) ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tanpa melihat masa kerja pekerja tersebut di Perusahaan. Ada juga kemungkinan jabatan yang sama tetapi upah yang diberikan berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan adanya pembinaan.

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Aktivitas yang dilakukan antara lain: - Memfasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku - Melakukan pemantauan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di perusahaan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi hak para tenaga kerja yang memang seharusnya diperoleh dan sebagai wujud tindakan preventif edukatif untuk mencegah potensi-potensi perselisihan hubungan industrial	SK Upah Minimum Provinsi (UMP) dan SK Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS)	2	2	2	2	2	SK	Disnakertrans DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Aktivitas yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ke Kalurahan-kalurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	500	500	500	500	500	orang	Disnakertrans DIY	-
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Memberikan pemahaman bagi perusahaanperusahaan terhadap norma K3 dan norma kerja, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan produktivitas	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan, Norma Kerja dan Norma K3 di Perusahaan	654	654	654	654	654	perusahaan	Disnakertrans DIY	-
3.B.4	Tersedianya pengembangan kompetensi ASN yang responsif gender (kebijakan mutasi dan pengembangan karir perempuan)	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	NA	NA	NA	NA	NA	persen	BKD	-
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan Jumlah jabatan formasi disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Seleksi CPNS dan PPPK termasuk di dalamnya formasi disabilitas	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Fasilitasi pengusulan SK Pensiun di BKN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Update Data ASN Disabilitas Pemda DIY Movev Data ASN Disabilitas Pemda DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan data kepegawaian ASN disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
			Mutasi dan Promosi ASN	-	-	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	NA	NA	NA	NA	NA	persen	BKD	-
				Pengelolaan Mutasi ASN	Penggunaan sistem merit dalam kegiatan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Fasilitasi pengusulan kenaikan pangkat ASN Disabilitas	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	NA	NA	NA	NA	NA	laporan	BKD	-
				Pengelolaan Promosi ASN	Penggunaan sistem merit dalam kegiatan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
			Pengembangan Kompetensi ASN	-	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	NA	NA	NA	NA	NA	persen	BKD	-
				Pengelolaan Assessment Center	Pengukuran kompetensi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Ujian Dinas bagi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Beasiswa S1, S2, dan S3 bagi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Peningkatan kompetensi ASN Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Fasilitasi ujikom ASN Disabilitas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	NA	NA	NA	NA	NA	orang	BKD	-
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pengangkatan dan Perpindahan Jabatan Fungsional bagi ASN Disabilitas	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	NA	NA	NA	NA	NA	orang	BKD	-
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	NA	NA	NA	NA	NA	persen	BKD	-
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemberian tambahan penghasilan pegawai disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	NA	NA	NA	NA	NA	dokumen	BKD	-
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PORNAS KORPRI dan Uji kesehatan pegawai disabilitas	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	NA	NA	NA	NA	NA	orang	BKD	-
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Fasilitasi pengusulan Satya lencana Karya Satya bagi ASN Disabilitas	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	NA	NA	NA	NA	NA	orang	BKD	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pembinaan Disiplin ASN	Sosialisasi disiplin pegawai, dan fasilitasi ijin perceraian, cuti bagi ASN Disabilitas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	NA	NA	NA	NA	NA	orang	BKD	-
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rapat penyelesaian pelanggaran disiplin tim	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	NA	NA	NA	NA	NA	laporan	BKD	-
4	PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN													
4.A	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan													
	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025-2028 sehingga Program Kegiatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih terperinci dapat di dalam RAD tersebut													
4.A.1	Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pertemuan di masyarakat, dan kegiatan komunitas di masyarakat	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Para Pihak dalam Pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat	Jumlah sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan	10	10	10	10	10	Kali Sosialisasi	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY	-
		Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi	Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (untuk sosialisasi, GEDSI bagi forum/komunitas di DIY)	Jumlah Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1	1	1	1	1	Kali Kegiatan	DP3AP2 DIY. Lembaga Terkait : Lembaga Anggota FPKK DIY	-
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Advokasi dan Pendampingan PUG dan GEDSI bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung	Jumlah OPD yang mendapat advokasi dan pendampingan PUG	38	38	38	38	38	OPD	DP3AP2, Lembaga Terkait : BAPPERIDA, BPKA, INSPEKTORAT	-
														-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
4.A.2	Terintegrasinya pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan ke dalam Aktifitas di satuan pendidikan Kewenangan Provinsi	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Bagi Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Lembaga Pendidikan (TIM PKK Satuan Pendidikan, Satgas PPK DIY)	Jumlah sosialisasi pencegahan dan penanganan ksanakan	5	5	5	5	5	Kali Sosialisasi	DP3AP2 DIY, Lembaga Terkait: Dikspora DIY, SMA, SMK	-
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	Implementasi pendidikan karakter melalui bahan ajar Pendidikan Khas Kejogjaan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus	Jumlah Laporan Kegiatan Pendidikan Khas Kejogjaan	1	1	1	1	1	Laporan	Dinas Dikpora DIY	-
4.A.3	Terjalinnnya kerjasama antar lembaga (termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal) dalam pencegahan dan pennaganan kekerasan.	Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO secara berjejaring	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	Kali Pertemuan	DP3AP2	-
4.A.4	Tersedianya data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Penyelenggaraan sistem pencatatan dan pelaporan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak DIY	Jumlah Sistem Data yang dikelola	1	1	1	1	1	Sistem	DP3AP2	-
4.B	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan													
	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025-2028 sehingga Program Kegiatan Penanganan Kekeraan Terhadap Perempuan secara lebih terperinci dapat di dalam RAD tersebut													
4.B. 1	Terpenuhnya layanan awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan assemen, intervensi krisis	Jumlah korban yang mendapatkan assemen, intervensi krisis	-	-	-	-	-	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
4.B.2	Terpenuhinya layanan Penjangkauan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan penjangkauam bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari wilayahnya ke tempat yang aman	Jumlah korban mendapatkan penjangkauam bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari wilayahnya ke tempat yang aman	-	-	-	-	-	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-
4.B.3	Pengelolaan Kasus Terpenuhinya layanan pengelolaan kasus bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mengakses bantuan kepada lembaga pertama yang dituju oleh korban	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan pengelolaan kasus baik secara inter maupun ektern	Jumlah korban mendapatkan pengelolaan kasus baik secara inter maupun ektern	-	-	-	-	-	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Melakukan pendampingan psikologi, rehabsos, rohani, kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah korban mendapatkan layanan	-	-	-	-	-	Korban	P2TPAKK/ BALAI PPA	-
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Pelatihan Manajemen Kasus Bagi Petugas Layanan berbasis masyarakat (misalnya Satgas PPA, dan FPKK/Satgas Tingkat Kalurahan)	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih	-	-	-	-	-	Orang	DP3AP2 , UPT Balai PPA	-
4.B.4	Tersedianya perlindungan sementara dan jangka panjang bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi darurat dan/atau mengancam jiwa	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter, dan Pengasuhan Sementara	Jumlah korban terfasilitasi	-	-	-	-	-	Korban	BPPA	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang (berupa pakaian, alat ibadah, penutup & alas kaki), penyediaan perlengkapan kebersihan individu PPKS,	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Korban	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	-	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	-	-	-	-	-	Korban	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan permakanan	Penyediaan bahan makanan dan minuman klien, dukungan penyediaan makan minum klien, dan penyediaan jasa tenaga juru masak	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan permakanan	Penyediaan bahan makanan dan minuman klien, dukungan penyediaan makan minum klien, dan penyediaan jasa tenaga juru masak	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan sandang	Penyediaan Sandang (berupa pakaian, alat ibadah, penutup & alas kaki), penyediaan perlengkapan kebersihan individu PPKS,	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	-	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
4.B.5	Terpenuhinya layanan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan korban melalui mekanisme rujukan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY	-
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	-	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	-	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSW	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSW
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	-	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSR	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSR

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanaan	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah di Akses	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-	-	-	-	Dokumen	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	-	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	-	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui BPRSA	Penanganan sebagai Klien dalam BPRSA

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
4.B.6	Tersedianya layanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kemudahan akses bagi korban agar korban segera tertangani	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Pemenuhan hak dasar terkait dengan kesehatan klien selama berada di dalam balai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Korban	Dinas Sosial DIY melalui RPS Camp Assesment	Dirujuk sebagai Klien RPS Camp Assesment
			- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Pemenuhan hak dasar terkait dengan kesehatan klien selama berada di dalam balai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Korban	Dinas Sosial DIY melalui RPS Anak	RPS Anak
			- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	korban	Dinas Sosial DIY melalui RPS Anak	RPS Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Penyelenggaraan layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Jumlah korban mendapatkan layanan medis dan medikolegal	-	-	-	-	-	Korban	BPPA	-
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	Fasilitasi Pembiayaan Layanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan anak	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Penyangga dan Disabilitas Sesuai Ketentuan	-	-	-	-	-	Persen	Dinas Kesehatan DIY Melalui Bapel Jamkesos DIY	-
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	-	Peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional lembaga pemberi layanan dalam	Puskemas yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak	-	-	-	-	-	persen	Dinas Kesehatan DIY	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		Masyarakat	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		memberikan layanan kesehatan	Prosentase pasien yang dilayani								-
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	Penyelenggaraan Layanan Medis dan Medikolegal Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Jumlah korban mendapatkan layanan medis dan medikolegal	-	-	-	-	-	persen	Dinas Kesehatan DIY, RSJ Grhasia, RS Respira	-
4.C	Tersedianya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan konseling dan/atau pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, secara khusus memiliki perspektif yang tidak bias gender	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Penyelenggaraan layanan Psikologis bagi klien selama berada di dalam balai	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui RPS Anak	Dirujuk sebagai Klien RPS Anak
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Penyelenggaraan layanan Psikologis bagi klien selama berada di dalam balai	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui RPS Camp Assesment	Dirujuk sebagai Klien RPS Camp Assesment
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Penyediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor, penyediaan dukungan penyelenggaraan rapat, penyediaan narasumber/instruktur & tenaga ahli, penyediaan jasa penyelenggara acara, dan perjalanan dinas	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial DIY melalui RPS Camp Assesment	Dirujuk sebagai Klien RPS Camp Assesment
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Penyelenggaraan Layanan Psikologis Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Korban mendapatkan layanan psikologis	-	-	-	-	-	Orang	BPPA	-
5	INFRASTRUKTUR RESPONSIF GENDER													

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
5. A	Tersedianya jumlah ruang publik (Terminal Bus, Stasiun KA, Mall, Pasar Tradisional, Perkantoran swasta, Taman/Ruang Terbuka, Lembaga Pendidikan, dll) yang memiliki Ruang Laktasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe B	Ruang Publik ruang laktasi	Persentase Ruang Laktasi di Ruang Publik	6	7	7	7	7	Jumlah Ruang Publik	Dishub, Dinas Penanaman Modal	-
5.B	Tersedianya kawasan pemukiman yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Menyediakan PSU layak di permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	178	178	178	178	178	Lokasi	Dinas ESDM PU	Perhitungan target tidak akumulatif
5.C	Terlayannya warga negara dengan air minum layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pelayanan terhadap warga negara melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.7 2	96.7 2	96.7 2	96.7 2	96.7 2	Persen	Dinas ESDM PU	Perhitungan target secara akumulatif
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	0	0	0	0	5	Hektar	Dinas ESDM PU	Perhitungan target tidak akumulatif
		Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pelayanan terhadap Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	2903 5	2953 5	3003 5	3005 35	3103 5	Rumah Tangga	Dinas ESDM PU	Perhitungan target secara akumulatif
5.D	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
6	PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN DALAM SITUASI DAERURAT DAN PERUBAHAN IKLIM													
6.A	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Program penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca bencana	Tersusunnya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1	1	1	1	1	Dokumen	BPBD	-
6.B	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	500	500	500	500	Orang	BPBD	-
														-
6.C	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12	12	12	12	12	Laporan	BPBD	-
6.D	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Layanan Kesehatan bagi Penduduk yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Kesehatan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Layanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Kesehatan	-
6.E	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	Penyediaan Permakanan	Perlindungan dan jaminan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban bencana Sosial	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	-
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	Target Layanan berupa Pemulasaraan dan Pemulangan Orang Terlantar
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	-
				Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya pada Masa Tanggap Darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	-
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kesiapsiagaan bencana dan perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
				Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana Dalam Penanganan Bencana	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	Target layanan diperuntukan memperkuat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
				Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah di lokasi rawan bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana di lokasi rawan bencana	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	-
				Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana	Penyuluhan sosial kepada masyarakat terkait	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) terkait	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	-
				Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	-	-	-	-	-	Dokumen	Dinas Sosial	-
				Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam)	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-	-	-	-	-	Orang	Dinas Sosial	Target layanan diperuntukan memperkuat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
6.F	Tercapainya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan pencemaran dan/atau Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan pencemaran pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Jumlah Penanggulangan Bencana pada Lokasi Rawan	50	50	50	50	50	Titik	DLHK	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penghentian pencemaran dan/atau Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	Penghentian sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50	50	50	50	50	Titik	DLHK	-
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuh lembaga ke masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	Pembinaan kelompok masyarakat	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	250	250	250	250	250	Entitas	DLHK	-
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompeten Sinya terkait PPLH	Jumlah lembaga/Kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompeten Sinya terkait PPLH	60	60	60	60	60	Kelompok	DLHK	-
6.G	Tercapainya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	Penanggulangan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50	50	50	50	50	Titik	DLHK	-
6.H	Terkelolanya sampah secara terpadu dan melibatkan komponen	Program pengolahan persampahan	Pemrosesan akhir di TPA/TPST regional	-	Pemrosesan akhir sampah dan residu di TPA/TPST regional	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST regional	-	-	-	-	-	Ton	DLHK	Berdasarkan Surat Gubernur Nomor 658/11898

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
	masyarakat		Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional	–	Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	13	13	13	13	13	Unit	DLHK	tanggal 19 Oktober 2023 tentang kebijakan penutupan TPA Piyungan secara permanen dan mulai diberlakukannya deentralisasi sampah ke masing-masing kabupaten/kota di wilayah DIY.
			Pemeliharaan TPA/TPST Regional	–	Pemeliharaan sarana dan prasarana TPA/TPST Regional	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	100	100	100	100	Persen	DLHK	Sub Kegiatan pengganti atasnya krn penutupan TPA dan diberlakukannya desentralisasi sampah
			Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	–	Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional yang diterapkan	Jumlah volume sampah dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional yang diterapkan	1000	1000	1000	1000	1000	Ton	DLHK	–
			Penyediaan Saranan dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPS Regional	–	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	-	-	-	-	-	Unit	DLHK	–
6.I	Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkualitas	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	–	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	13	13	13	13	13	Ruang Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	–
				–	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	1	1	1	1	Ruang Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	–

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
6.J	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	730	730	730	730	730	Hektar	DPKP	-
6.K	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	3	Unit	BPBD	-
6.L	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	1	1	2	2	Dokumen	BPBD	-
6.M	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Teknis dan Manajerial Personil TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	31	31	31	31	31	Orang	BPBD	-
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengadaan Peralatan Perlindungan Diri Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	5	5	5	5	5	Jenis	BPBD	-
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Terhadap Bencana	Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	1	1	1	1	Dokumen	BPBD	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
6.N	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	500	500	500	500	Orang	BPBD	-
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	12	12	12	12	12	Laporan	BPBD	-
6.O	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1	1	1	1	1	Dokumen	BPBD	-
6.P	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3	3	4	4	4	Dokumen	BPBD	-
7	MEDIA DAN PUBLIKASI RESPONSIF GENDER													
7.A	Terlaksananya publikasi responsif gender	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Publikasi terkait responsif gender di berbagai media	Jumlah publikasi terkait responsif gender	2	2	2	2	2	kali	Diskominfo	-
8	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PUG DI PROSES PEMBANGUNAN													
8.A	Pelembagaan PUG (Kebijakan, Sumberdaya Manusia dan Data Pilah)													
8.A1	Tersusun dan terdiseminasinya kebijakan yang memberikan penguatan hak perempuan dan kelompok rentan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Diseminasi regulasi PUG di DIY	Terlaksananya diseminasi regulasi PUG di DIY	1	1	1	1	1	kali kegiatan	DP3AP2	Pemenuhan Infrastruktur dan Kawasan Ramah Perempuan dan Anak

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
	untuk mendukung terciptanya keadilan gender melalui peningkatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan regulasi diy	Penyusunan naskah bahan kebijakan dan penyusunan regulasi terkait PUG	Tersusunnya regulasi terkait PUG	-	-	-	-	-	Dokumen	Biro Kesra Setda DIY	Penyusunan bahan rumusan kebijakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Setda DIY
8.A.2	Terpenuhinya SDM yang responsif gender dan memiliki kemampuan melakukan analisa gender pada seluruh proses pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Pelatihan PPRG bagi perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelatihan PPRG	38	38	38	38	38	OPD	DP3AP2	-
8.A.3	Terkelolanya satu data terintegrasi milik Pemerintah Daerah DIY yang menerapkan sistem data terpilah gender untuk mendukung proses pembangunan responsif gender di DIY	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Pengelolaan satu data terintegrasi	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	8	8	8	8	8	Dokumen	BAPPERIDA	-
8.B	Penyelenggaraan PUG													
8.B.1	Perencanaan													
8.B.1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah yang responsif gender (RPJPD/RPJMD/RKPD)	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	4	4	4	4	Dokumen	BAPPERIDA	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
8.B.2	Penganggaran													
8.B.2.1	Terdokumentasikan nya jumlah Sub kegiatan yang disertai KAK terintegrasi gender sebagai Gender Action Budget	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	2	2	2	Dokumen	BPKA	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	2	2	2	Dokumen	BPKA	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	2	2	2	Dokumen	BPKA	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	6	6	6	6	Dokumen	BPKA	-
8.B.3	Pelaksanaan													
8.B.3.1	Pelembagaan PUG melalui Koordinasi Pokja PUG	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PUG DIY	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pokja PUG DIY	1	1	1	1	1	Dokumen	DP3AP2	-
8.B.4	Pemantauan													
8.B.4.1	Terlaksananya Pemantauan Penyelenggaraan PUG tahunan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Rapat Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan PUG	Terlaksananya pemantauan penyelenggaraan PUG	1	1	1	1	1	Dokumen	DP3AP2	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
8.B.5	Evaluasi													
8.B.5.1	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan PUG tahunan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Rapat Evaluasi PUG dengan OPD driver	Terlaksananya rapat evaluasi PUG tahunan	1	1	1	1	1	Kali kegiatan	DP3AP2	-
8.B.6	Pengawasan													
8.B.6.1	Tersusunnya indikator dan borang/lembar isian pengawasan dan rencana pelaksanaan pengawasan	Penyusunan Pedoman/petunjuk teknis PUG dalam Pengawasan(Pemb aruan Keputusan inspektur DIY Nomor 28 /KPTS/2021 Tentang prubahan keputusan Inspektur DIY nomor 31 tahun 2018 tentang pedoman, pengawasan PPRG)	-	-	Tersusunnya dokumen Pedoman/petunjuk teknis PUG dalam Pengawasan PPRG	Jumlah dokumen Pedoman/petunjuk teknis PUG dalam Pengawasan PPRG	1	1	1	1	1	Dokumen	Inspektorat	-
8.B.6.2	Terlaksananya pengawasan PUG pada prangkat Daerah DIY	Rekomendasi APIP/Inspektorat terkait PUG dalam Perencanaan (Integrasi Isu Gender dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD)	-	-	Tersusunnya rekomendasi APIP/Inspektorat terkait PUG dalam Perencanaan	Jumlah Dokumen rekomendasi APIP/Inspektorat terkait PUG dalam Perencanaan	1	1	1	1	1	Dokumen	Inspektorat	-
8.B.7	Pelaporan													
8.B.7.1	Substansi gender dalam dokumen pelaporan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintah	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Tersusunnya substansi gender dalam dokumen LKJIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJiP Perangkat daerah yang memasukkan substansi gender	38	38	38	38	38	Dokumen	Biro Organisasi	-
		-	-	-	Tersusunnya substansi gender dalam dokumen LKPJ DIY	Jumlah Dokumen LKPJ Pemda DIY yang memuat substansi gender	1	1	1	1	1	Dokumen	Biro Tata pemerintahan	-

NO	TARGET CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN					SATUAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
							2028	2029	2030	2031	2032			
		-	-	-	Tersusunnya substansi gender dalam dokumen LPPD DIY	Jumlah Dokumen LKPPD Pemda DIY yang memuat substansi gender	1	1	1	1	1	Dokumen	Biro Tata pemerintahan	-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum,

Cahyo Widayat, S.H. , M.Si.